

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH
RPJPD
KOTA DEPOK



PEMERINTAH KOTA DEPOK
2007



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA DEPOK TAHUN 2006 - 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka, meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - c. bahwa agar pelaksanaan pembangunan daerah Kota Depok dalam kurun waktu 20 (duapuluh) tahun mendatang dapat terarah, berkesinambungan, efektif dan efisien serta dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat, telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Jo. Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - e. bahwa ...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Undang ...

9. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

DAN

WALIKOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA DEPOK TAHUN 2006 – 2025.

Pasal 1

- (1). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 merupakan Dokumen Perencanaan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
- (2). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang memuat pengantar, pengertian, maksud dan tujuan, landasan hukum dan tata urutan.

BAB II Kondisi umum analisis dan prediksi kondisi umum daerah yang memuat penjelasan umum mengenai kondisi pada saat ini pada titik awal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dalam setiap sektor pembangunan, tantangan yang akan dihadapi selama 20 (duapuluh) tahun ke depan dengan prediksi kondisi umum masing-masing sektor pembangunan 20 (duapuluh) tahun ke depan dan modal dasar yang dimiliki oleh daerah sebagai pendukung pembangunan.

BAB III Visi dan misi pembangunan daerah tahun 2006-2025, yang memuat visi pembangunan daerah Kota Depok dan misi pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut.

BAB IV Arah, tahapan dan prioritas pembangunan tahun 2006-2025 yang memuat upaya-upaya mengatasi kendala dan permasalahan serta tantangan yang akan terjadi untuk pencapaian visi dan misi Kota Depok.

BAB V Penutup.

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Depok Tahun 2002-2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 31 Januari 2008

WALIKOTA DEPOK,

ttd.

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 31 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

Dra. WINWIN WINANTIKA, MM
NIP. 480 093 043

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2008 NOMOR 01

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR : 01 TAHUN 2008

TANGGAL : 31 JANUARI 2008

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2006-2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pengantar

Lahirnya era reformasi berdampak pada perubahan arah dan kebijakan pembangunan, yaitu berupa pengurangan peran Pemerintah Pusat dan peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Perubahan tersebut secara politik tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dengan berlakunya Undang-undang tersebut, maka Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dituntut untuk mampu mengidentifikasi keunggulan komparatif (*comparative advantages*) wilayahnya. Keunggulan komparatif tersebut selanjutnya diarahkan dan dikembangkan secara terencana sehingga terwujud pengembangan daerah yang optimal, tercermin dari luasnya kesempatan kerja dan berusaha, serta adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kota Depok mempunyai keunggulan komparatif berupa letaknya yang sangat strategis ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan, karena berbatasan langsung dengan Ibukota Negara DKI Jakarta. Saat ini Kota Depok telah tumbuh sebagai kota niaga dan jasa, namun *core competence* ini belum mampu dikelola secara optimal lantaran masih terbatasnya kemampuan daerah terutama dalam hal pembiayaan.

Untuk memformulasikan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif, dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum, pemerintah daerah berkewajiban menyusun rencana pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan memperhatikan kemampuan sumber daya yang dimiliki. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, rencana tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

RPJPD Kota Depok disusun dengan periodisasi waktu dimulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2025. Hal itu dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok I yang telah ditetapkan terlebih dahulu yaitu pada tahun 2006. Meskipun tidak sesuai dengan periodisasi RPJP Nasional Tahun 2005-2025 namun RPJPD Kota Depok telah diselaraskan isinya dengan RPJP Nasional.

1.2. Pengertian

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok tahun 2006-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah Kota Depok yang disusun dengan mengacu kepada RPJP Nasional, dan diselaraskan dengan RPJMD Kota Depok tahun 2006-2011. RPJPD Kota Depok disusun secara partisipatif dengan melibatkan semua pelaku pembangunan (*stakeholders*) dengan mempertimbangkan batas kewenangan pemerintah daerah dan kemampuan keuangan daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006 - 2025 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh komponen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan stakeholder lainnya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan nasional dan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan RPJP Daerah Kota Depok adalah :

- a. Untuk menetapkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang disepakati bersama berdasarkan musyawarah, sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah dan dokumen perencanaan lainnya.
- b. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan memperhatikan basis potensi yang dimiliki.

1.4. Landasan Hukum

Landasan Hukum Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 antara lain adalah :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2006-2011.

1.5. Tata Urut

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

- Bab I** Pendahuluan yang memuat pengantar, pengertian, maksud dan tujuan, landasan hukum dan tata urut.
- Bab II** Kondisi Umum Analisis dan Prediksi Kondisi Umum Daerah yang memuat penjelasan umum mengenai kondisi pada saat ini pada titik awal penyusunan RPJP Daerah dalam setiap sektor pembangunan, tantangan yang akan dihadapi selama 20 tahun ke depan dengan prediksi kondisi umum masing-masing sektor pembangunan 20 tahun ke depan dan modal dasar yang dimiliki oleh daerah sebagai pendukung pembangunan.
- Bab III** Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 yang memuat visi pembangunan daerah Kota Depok dan misi pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut.
- Bab IV** Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2025 yang memuat upaya-upaya mengatasi kendala dan permasalahan serta tantangan yang akan terjadi untuk pencapaian visi dan misi Kota Depok.
- Bab V** Penutup.

BAB II

KONDISI UMUM DAERAH

2.1. Kondisi Kota Depok Saat Ini

Pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah menunjukkan berbagai kemajuan, tetapi masih banyak pula masalah dan tantangan yang belum dapat diselesaikan. Untuk dapat melihat kemajuan dan tantangan yang ada saat ini, dapat dilakukan dengan melihat dan menganalisis kondisi dari berbagai aspek berikut ini :

- Geomorfologi dan Lingkungan Hidup;
- Demografi;
- Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- Sosial Budaya dan Politik;
- Prasarana dan sarana;
- Pemerintahan.

2.1.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

Depok berada dalam posisi yang strategis karena terletak pada poros wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Secara geografis Depok terletak pada koordinat 6° 19' 00" – 6° 28' 00" Lintang Selatan dan 106° 43' 00" – 106° 55' 30" Bujur Timur. Bentang alam Kota Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah dataran rendah - perbukitan bergelombang lemah, dengan elevasi antara 50 – 140 meter diatas permukaan laut dan kemiringan lerengnya kurang dari 15%.

Kota Depok mempunyai luas wilayah sekitar 200,29 km², dengan kondisi geografisnya dialiri oleh sungai-sungai besar dan mata air yang timbul menjadi air permukaan berupa situ-situ. Luas situ dan danau pada tahun 2005 sebesar 0,84%, dengan kualitas air relatif baik dan sebagian kecil sudah tercemar.

Kondisi topografi berupa dataran rendah bergelombang dengan kemiringan lereng yang landai menyebabkan masalah banjir di beberapa wilayah, terutama kawasan cekungan antara beberapa sungai yang mengalir dari Selatan menuju Utara yaitu Kali Angke, Sungai Ciliwung, Sungai Pesangrahan dan Kali Cikeas.

Sumber daya lahan Kota Depok mengalami tekanan, sejalan dengan perkembangan kota. Kebijakan pemerintah yang memposisikan Kota Depok sebagai daerah penyangga Ibukota Jakarta,

telah menyebabkan tekanan dan persaingan yang ketat dalam pemanfaatan lahan untuk pemukiman. Dalam pemanfaatan ruang kota, pada tahun 2005 kawasan pemukiman mencapai 89,03% dari total pemanfaatan ruang Kota Depok, atau 44.31% dari luas kota.

Sumber Daya Air terdiri dari dua sumber utama yaitu sungai dan situ. Secara makro sungai-sungai di Kota Depok termasuk kedalam dua satuan wilayah sungai besar, yaitu sungai Ciliwung dan Cisadane. Selanjutnya sungai-sungai tersebut dibagi menjadi 13 Satuan Wilayah Aliran Sungai, yaitu sungai Ciliwung, Kali Baru, Pesanggrahan, Angke, Sugutamu, Cipinang, Cijantung, Sunter, Krukut, Saluran Cabang Barat, Saluran Cabang Tengah dan sungai Caringin. Berkaitan dengan situ, saat ini Kota Depok memiliki 25 situ yang tersebar di wilayah Timur, Barat dan Tengah. Luas keseluruhan situ dan danau yang ada di Kota Depok berdasarkan data tahun 2005 adalah seluas 168,24 Ha, atau sekitar 0,84% luas Kota Depok. Kedalaman situ-situ yang ada Kota Depok bervariasi antara 1 sampai 4 meter. Dari pengukuran kualitas air pada situ-situ di Kota Depok, kualitas air yang paling buruk terdapat pada Situ Gadog dan Rawa Besar. Selain penurunan kualitas air, kawasan situ juga mengalami degradasi luasan.

Kualitas udara di Kota Depok berdasarkan data tahun 2005, pada 4 (empat) titik pengamatan atas kadar SO₂, NO₂, CO, O₃ dan Pb masih memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Konsentrasi Sulfur Dioksida (SO₂) pada 4 (empat) titik pengamatan tersebut antara 0,1 – 16,14 mikro-gram/m³, di bawah ambang baku mutu 365 mikro-gram/m³. Konsentrasi Nitrogen Oksida (NO₂) pada 4 titik pemantauan tersebut antara 2,94 – 15,95 mikro-gram/m³, di bawah ambang baku mutu 150 mikro-gram/m³. Konsentrasi Karbon Monoksida (CO) pada 4 titik pemantauan tersebut antara 151,45 – 716,84 mikro-gram/m³, di bawah ambang baku mutu 10.000 mikro-gram/m³. Konsentrasi Oksidan (O₃) pada 4 titik pemantauan tersebut antara 12,94 – 40,38 mikro-gram/m³, di bawah ambang baku mutu 235 mikro-gram/m³. Konsentrasi Timbal (Pb) pada 4 titik pemantauan tersebut antara 0,16 – 1,56 mikro-gram/m³, di bawah ambang baku mutu 2 mikro-gram/m³. Sedangkan konsentrasi debu (partikulat) pada 4 (empat) titik pemantauan tersebut antara 0,078 – 0,364 mikro-gram/m³, dengan ambang baku 0,23 mikro-gram/m³. Kondisi tersebut akan dipertahankan pada tahun-tahun yang akan datang melalui Program Langit Biru. Sedangkan untuk konsentrasi debu akan terus dikurangi di bawah ambang mutu standar pada tahun-tahun berikutnya, memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Limbah cair yang berasal dari limbah manusia diatasi melalui sistem *septic-tank*. Air limbah pemukiman manusia yang berupa air buangan kamar mandi, air bekas cuci, dan air bekas kegiatan perkotaan lainnya masih menggunakan sistem tercampur, yaitu air limbah dan air hujan dialirkan melalui satu saluran. Sedangkan untuk air limbah industri dan komersial belum ada sistem yang menanganinya secara khusus.

Limbah padat Kota Depok diatasi dengan sistem *sanitary landfill* yang berlokasi di TPA Cipayung, berdekatan dengan sungai Pesanggrahan yang berfungsi sebagai tempat pembuangan air

lindi *landfill*. Sistem penanganan limbah padat akan dikembangkan lebih lanjut berupa program daur ulang dan sistem komposting. Secara garis besar, volume sampah Kota Depok dapat dihitung melalui perkalian antara timbulan sampah per kapita dikalikan jumlah populasi penduduk Kota Depok. Pada tahun 2005 timbulan sampah yang dihasilkan Kota Depok mencapai 766 meter kubik per hari dengan tingkat pertumbuhan sampah sebesar 4.4%. Dari total sampah yang dihasilkan, sekitar 488 meter kubik per hari yang terlayani, atau 63.71%.

Sebagian besar sampah yang dihasilkan penduduk Kota Depok merupakan sampah organik yang mudah membusuk dan berasal dari produk domestik (63%), sedangkan sisanya berasal dari pasar (19%), komersial dan jalan (14%), industri dan rumah sakit (4%).

Pada tahun 2000 kawasan terbuka (hijau) tercatat 53,83% dan kawasan terbangun 46,18% dari total wilayah Kota Depok. Pada tahun 2005, ruang terbuka (hijau) menyusut tinggal 50,54% dan kawasan terbangun meningkat lebih dari 3% menjadi 49,46%. Meningkatnya tutupan permukaan tanah terutama disebabkan oleh tekanan dari pemanfaatan lahan untuk kegiatan pemukiman.

Kebijakan pemerintah yang memposisikan Kota Depok sebagai wilayah pemukiman dan penyangga ibukota Jakarta menyebabkan kepadatan pemukiman yang berlebihan di beberapa tempat di Kota Depok. Tekanan paling berat dialami oleh sumber daya air (sungai dan situ), yang menjadi tempat pembuangan limbah domestik berbentuk limbah cair maupun padat. Alih fungsi lahan di sekitar situ menjadi pemukiman penduduk juga menambah tekanan berupa degradasi jumlah luasan situ-situ.

Kegiatan pulang-pergi (*commuter*) penduduk Kota Depok dari dan ke Jakarta untuk bekerja, menyebabkan meningkatnya kepadatan lalu lintas yang berdampak pada timbulnya kemacetan kota. Tingginya jumlah kendaraan juga mengakibatkan peningkatan polusi udara.

2.1.2. Demografi

Sebagai kota yang berbatasan langsung dengan dengan Ibukota Negara, Kota Depok menghadapi berbagai permasalahan perkotaan, termasuk masalah kependudukan. Dalam kaitan ini Kota Depok mendapatkan tekanan migrasi penduduk yang cukup tinggi sebagai dampak dari meningkatnya perkembangan kota dengan tumbuhnya berbagai kawasan permukiman, pusat-pusat pendidikan, perdagangan dan jasa.

Jumlah penduduk Kota Depok, selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan cukup besar. Pada tahun 2002 jumlah penduduk Kota sebanyak 1.247.233 jiwa dan pada tahun 2006 mencapai 1.420.480 jiwa dengan perkembangan rata-rata per tahun sebesar 3.47%. Laju pertumbuhan penduduk Kota Depok ini tergolong tinggi yang disebabkan adanya perbedaan penduduk yang lahir dan mati, serta penduduk yang datang dan pindah ke dan dari kota tersebut. Dengan luas wilayah 200,29 km², maka kepadatan penduduk Kota Depok mencapai 7.092,12 jiwa/km², atau sekitar 71 jiwa per hektar. Adapun komposisi penduduk terdiri atas laki-laki 719.969 jiwa (50,68%) dan perempuan 700.511 jiwa (49,32%), sehingga rasio jenis kelamin (*sex ratio*) adalah sebesar 102.

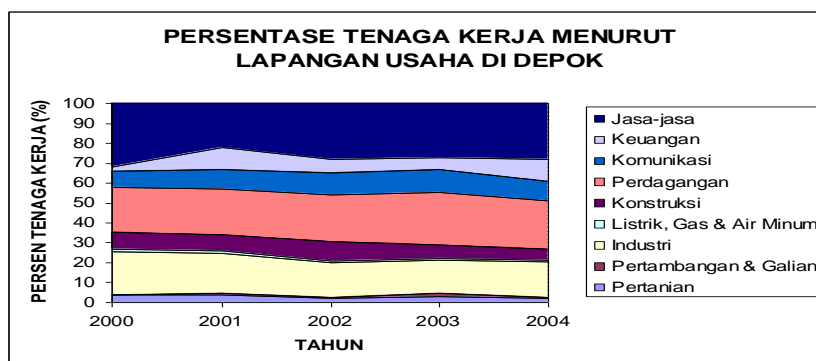
Angka kelahiran penduduk dari tahun 1999 sampai 2004 mengalami fluktuasi, demikian juga angka kematian penduduk Kota Depok, berfluktuasi hampir mendekati pola angka kelahiran. Pada tahun 2004, jumlah penduduk yang lahir 3.713 jiwa dan mati 1,962 jiwa (selisih 1751 jiwa). Angka kepergian penduduk Kota Depok juga berfluktuasi, yaitu jumlah penduduk yang datang 11.899 jiwa dan penduduk yang pergi 4503 jiwa (selisih 7.396 jiwa).

Kualitas sumberdaya manusia di Kota Depok dilihat dari segi pendidikan relatif masih terbatas. Pada Tahun 2005, persentase angkatan kerja yang tamat pendidikan SD sebesar 22.41%, tamat SLTA 24.61%, sedangkan yang lulus perguruan tinggi atau diploma keatas sebesar 25.28%. Dengan rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja, adaptasi terhadap perkembangan teknologi relatif rendah. Kendala ini menyebabkan kurangnya daya serap pasar terhadap tenaga kerja yang ada. Akhirnya banyak angkatan kerja yang memilih sektor informal yang kurang produktif dengan upah yang relatif rendah dibandingkan sektor formal.

Pertumbuhan upah dibandingkan dengan pertumbuhan nilai tambah per pekerja cenderung menurun selama lima tahun terakhir sehingga berdampak pada produktivitas kerja. Upah minimum pekerja disektor formal setiap tahun mengalami penyesuaian berupa kenaikan, namun nilai tambah produksi yang dihasilkan diperkirakan tidak sebanding dengan peningkatan upah pekerja. Penurunan produktivitas akan berdampak pada melemahnya daya saing yang sangat diperlukan dalam memperkuat core competence kota.

Menurut data ketenagakerjaan pada tahun 2005, penduduk Kota Depok yang bekerja adalah sebesar 46.02% dari total penduduk usia kerja (10 tahun ke atas), sedangkan yang belum mendapatkan kesempatan kerja (pengangguran) sebesar 8.48%. Angkatan kerja se Kota Depok adalah 617.288 jiwa atau sebesar 54.5% dari total penduduk usia kerja, dan sisanya sebesar 515.284 jiwa atau 45,5 % merupakan kelompok Bukan Angkatan Kerja.

Grafik pada **Gambar II.1.** berikut ini menunjukkan bahwa angkatan kerja di Kota Depok sebagian besar bekerja di sektor tersier, yaitu sektor yang meliputi lapangan usaha perdagangan, angkutan, komunikasi, keuangan dan jasa-jasa. Pada tahun 2005, jumlah angkatan kerja yang terlibat disektor tersier ini mencapai 75.7% dari total angkatan kerja. Pada sektor sekunder, yaitu sektor yang meliputi lapangan usaha industri pengolahan, listrik, gas, air minum dan konstruksi, jumlah angkatan kerja yang terlibat sebanyak 22.31% dari total angkatan kerja. Sedangkan disektor primer, yaitu sektor yang meliputi lapangan usaha pertanian dan pertambangan, jumlah angkatan kerja yang terlibat hanya 1,44% dari total angkatan kerja.



Gambar II.1. Persentase Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha di Kota Depok

2.1.3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

2.1.3.1 Sektor Primer

- Pertanian

Sektor pertanian dalam arti luas mencakup sub-sektor tanaman pangan, sub-sektor peternakan dan sub-sektor perikanan. Menurut data tahun 2005 sektor pertanian menyerap 1.44% tenaga kerja, serta memberikan kontribusi PDRB sebesar 3.00% terhadap nilai total PDRB Kota Depok, dengan laju pertumbuhan 4.70%. Angka-angka ini relatif kecil, karena sektor pertanian masih menghadapi berbagai permasalahan yang perlu ditangani, yaitu produktivitas, efisiensi usaha, konservasi lahan pertanian, keterbatasan sarana dan prasarana, serta terbatasnya kredit dan infrastruktur pertanian.

Komoditas pertanian yang diusahakan di lahan sawah berupa tanaman padi, palawija (kedele dan kacang tanah), dan sayur-sayuran (pitsai/sawi, bawang merah dan tomat). Sedangkan komoditas pertanian tanaman pangan yang umumnya diusahakan di lahan kering adalah jagung, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar.

Luas lahan sawah menurut data BPS (2006) sekitar 972,10 Ha, sedangkan luas panen dan produksi dari berbagai jenis tanaman pangan adalah sebagai berikut : padi 901 ha dan 4.865,40 ton, ubi kayu 336 ha dan 26.181,12 ton, ubi jalar 274 ha dan 45,90 ton, jagung 441 ha dan 1.297,22 ton, kacang tanah 252 ha dan 304,46 ton. Adapun luas panen kacang panjang 365 ha, cabe 72 ha, terong 267 ha, mentimun 223 ha, kangkung 343 ha, dan bayam 303 ha.

Pembangunan pertanian di Kota Depok dilaksanakan melalui konsep Pertanian Perkotaan, artinya pembangunan pertanian yang didasarkan atas pemanfaatan lahan sempit, rata-rata kurang dari 2 Ha untuk setiap rumah tangga petani.

Beberapa komoditas perkebunan di Kota Depok tidak diusahakan lagi karena adanya peralihan fungsi lahan seperti kelapa, kelapa hybrida, kopi dan melinjo, sementara beberapa komoditas lainnya masih dipertahankan meskipun mengalami penurunan produksi, yaitu jahe (luas 4,93 ha, produksi 5,979 ton), dan kencur (luas panen 7,625 ha, produksi 7,625 ton) (BPS, 2006).

Komoditas perkebunan rakyat yang paling berpotensi dan sangat berkembang di Kota Depok adalah belimbing. Selama tahun 2000 sampai 2004 produksi buah belimbing mengalami perkembangan yang sangat pesat, meningkat sebesar 236% lebih dan pada tahun 2006 dengan produksi mencapai 3.162 ton. Tingginya produksi ini disebabkan oleh populasi tanaman yang terus bertambah dan produktivitas yang meningkat akibat introduksi ilmu pengetahuan dan teknologi budidaya. Minat berusaha tani belimbing mulai meningkat dipicu oleh daya serap pasar yang kuat, harga yang relatif stabil dan margin laba yang cukup memadai. Kecocokan agroklimat dan tersedianya varietas unggul menjadikan belimbing Depok memiliki keunggulan komparatif sekaligus kompetitif dibandingkan belimbing dari daerah lain.

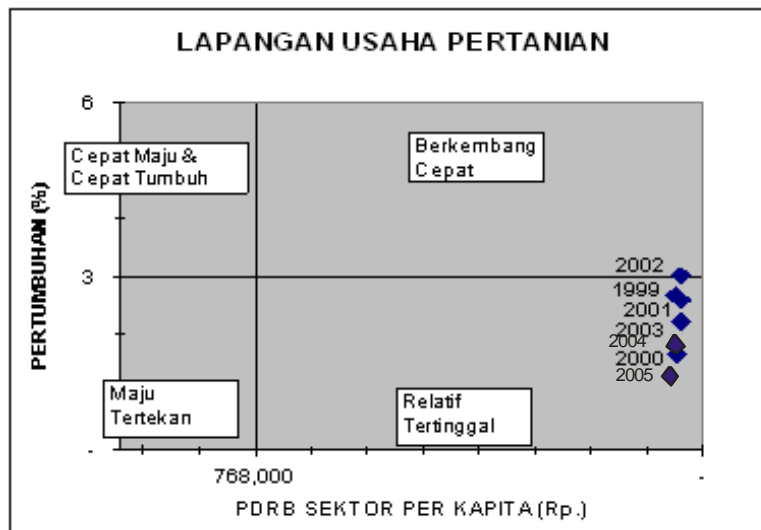
Pada tahun 2006 perusahaan ternak sebagian besar berupa usaha skala kecil. Populasi ternak besar (khususnya sapi) yang cukup tinggi di Kota Depok disebabkan adanya ternak yang masuk dari luar kota ke dalam lokasi transit di Kota Depok sebelum dikirim ke Rumah Potong Hewan (RPH). Jumlah populasi berbagai jenis ternak besar adalah: sapi perah 967 ekor, sapi potong 2.020 ekor, kerbau 428 ekor, dan kuda 197 ekor. Sedangkan populasi ternak kecil dan unggas adalah : kambing 8.638 ekor, domba 3.713 ekor, anjing 2.785 ekor, ayam 835.671 ekor, dan itik 27.980 ekor.

Kota Depok tidak memiliki kawasan hutan, kecuali hutan kota. Luas wilayah hutan kota sekitar 26.04 ha atau 0,13% dari total wilayah Kota Depok.

Potensi perikanan terbatas pada perikanan darat. Menurut data pada tahun 2006, luas areal tiap jenis kolam adalah sebagai berikut: kolam pembenihan 15,91 ha, kolam air tenang 219,46 ha dan jaring apung (japung) sejumlah 828 buah. Produksi ikan pada tahun 2006 adalah: kolam pembenihan 11.920 ekor senilai Rp. 1.782.614.000,-, kolam air tenang 1.327,59 ton senilai Rp. 13.778.470.000,- dan japung 30,48 ton senilai Rp. 237.830.000,-.

Selain ikan konsumsi, dikembangkan juga ikan hias. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir terjadi peningkatan produksi ikan hias sebesar 133,8%. Peningkatan ini disebabkan oleh berkembangnya rumah tangga perikanan dan produktivitas yang semakin meningkat (138,5%). Pasar ekspor ikan hias yang terbuka menjadikan usaha tani ikan hias berkembang dan diminati masyarakat. Selain pasar ekspor, pasar lokal dan pasar regional juga sangat terbuka. Hingga tahun 2006, luas lahan produksi ikan hias mencapai 7,96 ha dengan produksi mencapai 58.719.390 ekor dengan nilai Rp. 34.064.072.000,-.

Selama lima tahun terakhir, dibandingkan angka rata-rata Jawa Barat, baik pertumbuhan maupun rata-rata PDRB per kapitanya, lapangan usaha pertanian Kota Depok relatif tertinggal. Secara grafis, perbandingan lapangan usaha pertanian Jawa Barat dan Kota Depok dapat dilihat pada **Gambar II.2.**



Gambar II.2. Posisi Lapangan Usaha Pertanian Kota Depok dibanding rata-rata Jawa Barat

Perkembangan PDRB (ADHK 2000) Kota Depok yang berasal dari Lapangan usaha pertanian adalah sebagaimana ditunjukkan dalam **Tabel II.1.a**. Sedangkan persentase PDRB lapangan usaha pertanian Kota Depok dibandingkan total PDRB Kota Depok dapat dilihat pada **Tabel II.1.b**.

Tabel II.1. a. PDRB Lapangan Usaha Pertanian (ADHK 2000) di Kota Depok (dalam juta rupiah)

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005
PERTANIAN	144.562,46	149.731,67	153.071,51	159.556,91	167.053,64
Tanaman Bahan Makanan	24.716,83	27.069,24	27.824,47	28.037,29	28.598,04
Tanaman Perkebunan	191,00	199,00	211,00	218,00	220,18
Peternakan	103.493,07	105.379,97	107.687,79	113.682,37	120.087,59
Kehutanan	-	-	-	-	-
Perikanan	16.161,56	17.083,46	17.348,25	17.619,25	18.147,83

Sumber : BPS, 2006

Tabel II.1. b. Persentase PDRB Lapangan Usaha Pertanian (ADHK 2000) di Kota Depok (dalam persen)

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005
PERTANIAN	3,91	3,82	3,67	3,60	3,52

Sumber : BPS, 2006

- **Pertambangan/Penggalian**

Di wilayah Kota Depok, tidak ada potensi bahan tambang/galian, baik golongan A, B maupun C, serta Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok yang berasal dari lapangan usaha ini.

2.1.3.2 Sektor Sekunder

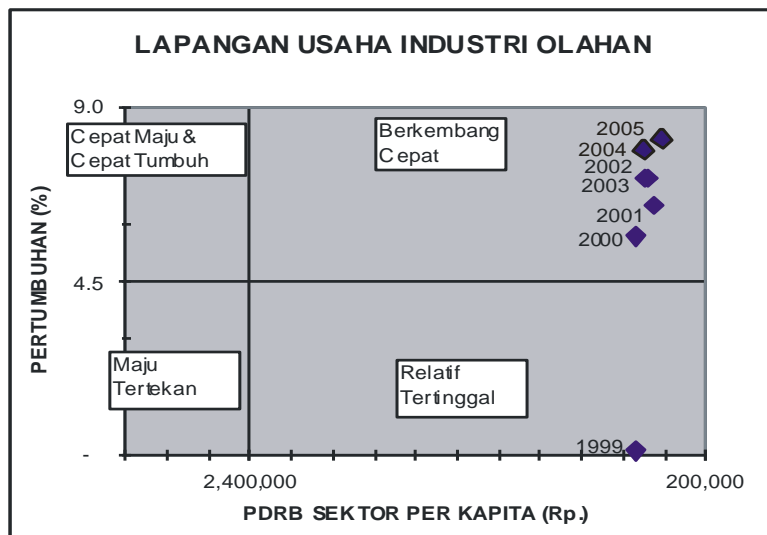
- **Industri Pengolahan**

Pada tahun 2005, industri pengolahan yang terdapat di Kota Depok berjumlah 105 unit usaha, terbanyak sub sektor industri kimia, barang dari bahan kimia, minyak bumi, batu bara, karet, plastik yaitu 31 unit usaha dan diikuti sub sektor industri tekstil, pakaian jadi dan kulit sebanyak 23 unit usaha.

Penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha industri pengolahan sebanyak 35.057 jiwa yang didominasi oleh industri tekstil, pakaian jadi dan kulit sebanyak 12.751 orang; diikuti industri kimia, barang dari bahan kimia, karet dan plastik sebanyak dengan tenaga kerja 9.951 orang.

Hasil-hasil industri pengolahan di Kota Depok sebagian telah menjadi komoditas ekspor. Menurut Dr. Muhammad Wahyudin dalam buku “Industri Orentasi Ekspor : Dinamika dan Analisis Spatial”, selama dasawarsa 1990–1999, Kota Depok diklasifikasikan sebagai kota yang tinggi ekspor industri manufakturnya diantara 182 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Ada 80 kabupaten/kota yang mendapat peringkat tinggi ekspor industri manufakturnya pada tahun 1990, empat diantaranya dari DKI Jakarta dan Jawa Barat, yaitu: Kabupaten Karawang, Kotamadya Jakarta Pusat, Kota Tangerang dan Kota Depok.

Pada tahun 1999, terdapat 76 kabupaten/kota yang tergolong tinggi ekspor industri manufakturnya, lima diantaranya dari DKI Jakarta dan Jawa Barat, yaitu: Kota Bogor, Kotamadya Jakarta Barat, Kotamadya Jakarta Pusat, Kota Bekasi dan Kota Depok. Pada tahun 2006, ekspor industri manufaktur Kota Tangerang menjadi sangat tinggi, Kota Bogor dan Kota Bekasi menurun, sedangkan Kota Depok stabil.



Gambar II.3. Posisi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Kota Depok dibanding Jawa Barat

Sejak tahun 2001 sampai dengan 2005, rata-rata pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan di Kota Depok berkembang cepat dibandingkan Jawa Barat yakni diatas 5% per tahun (ADHK 2000), sementara Jawa Barat hanya 4,5% per tahun. Meskipun lapangan usaha industri pengolahan di Kota Depok berkembang cepat, namun PDRB lapangan usaha ini masih dibawah PDRB

Jawa Barat, yaitu Rp. 1.376.119,- per kapita (ADHK 2000) sedangkan rata-rata PDRB lapangan usaha industri pengolahan di Jawa Barat adalah Rp. 2.400.000,- per kapita. Secara grafis, perbandingan lapangan usaha industri pengolahan Jawa Barat dan Kota Depok dapat dilihat pada **Gambar II.3**.

Perkembangan PDRB (ADHK 2000) Kota Depok yang berasal dari lapangan usaha industri pengolahan adalah sebagaimana ditunjukkan dalam **Tabel II.2.a**. Sedangkan persentase PDRB lapangan usaha industri pengolahan Kota Depok dibandingkan total PDRB Kota Depok adalah sebagaimana ditampilkan pada **Tabel II.2.b**.

Tabel II.2. a. PDRB Kota Depok (ADHK 2000) dari Lapangan Usaha Industri Pengolahan (dalam juta rupiah)

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005
INDUSTRI PENGOLAHAN	1.436.273,00	1.559.431,51	1.671.866,52	1.793.348,32	1.954.749,67
Industri Migas	-	-	-	-	-
3.1.1. Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-	-	-
3.1.2. Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
Industri Non Migas	1.436.273,00	1.559.431,51	1.671.866,52	1.793.348,32	1.954.749,67

Sumber : BPS, 2006

Tabel II.2. b. Persentase PDRB dari Lapangan Usaha Industri Pengolahan (ADHK 2000) di Kota Depok (dalam persen)

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005
INDUSTRI PENGOLAHAN	38,87	39,78	40,13	40,45	41,23
Industri Migas	-	-	-	-	-
3.1.1. Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-	-	-
3.1.2. Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
Industri Non Migas	38,87	39,78	40,13	40,45	41,23

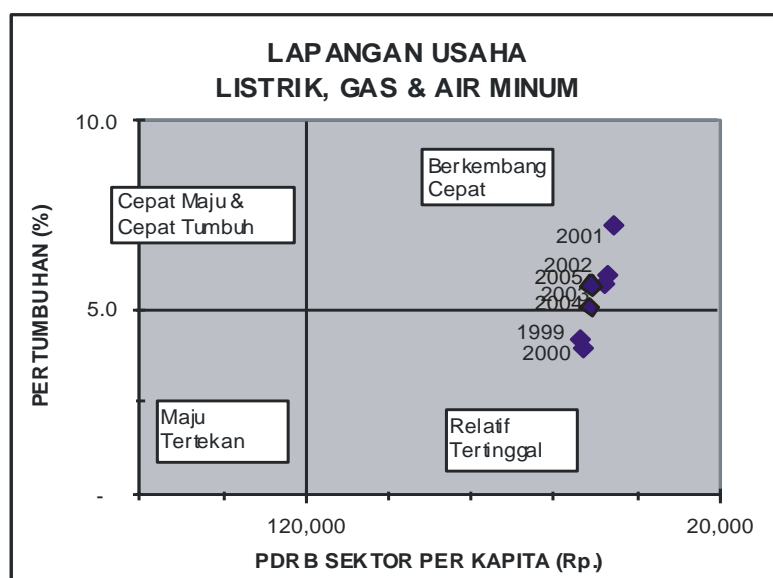
Sumber : BPS, 2006

- **Listrik, Gas dan Air Minum**

Industri energi listrik di Kota Depok pada tahun 2006 memiliki jumlah pelanggan sebesar 282.959 pelanggan, energi yang terjual sebesar 755.699.105 Kwh dan daya tersambung 436.792.844 VA. Jumlah energi listrik terjual menurut kelompok pelanggan: rumah tangga 455.737.273 kwh, industri 134.246.20 kwh, kantor niaga (tarif usaha) 101.196.369 kwh, serta sosial dan pemerintahan 64.519.267 kwh.

Penyediaan air minum di Kota Depok sampai dengan tahun 2007 masih dikelola oleh PDAM Kabupaten Bogor dan KPS Air Bersih. Pada tahun 2006, jumlah pelanggan PDAM di Kota Depok 40.027 pelanggan (SL) dan besarnya pemakaian PDAM adalah 12.238.584 meter kubik.

Ditinjau dari rata-rata pertumbuhan lapangan usaha listrik, gas & air minum Kota Depok berkembang cepat dibandingkan Jawa Barat. Sejak tahun 2003 sampai dengan 2005 pertumbuhan lapangan usaha listrik, gas & air minum di Kota Depok selalu diatas 5% per tahun (ADHK 2000) (lihat **Gambar II.4.**), padahal rata-rata pertumbuhan lapangan usaha listrik, gas & air minum di Jawa Barat hanya 5% per tahun. PDRB lapangan Usaha listrik, gas & air minum di Kota Depok pada tahun 2005 sebesar Rp. 157.837,97 juta (ADHK 2000). Secara grafis, perbandingan lapangan usaha listrik, gas & air minum Jawa Barat dan Kota Depok dapat dilihat pada **Gambar II.4**.



Gambar II.4. Posisi Lapangan Usaha Listrik, Gas & Air Minum Kota Depok dibanding Jawa Barat

Perkembangan PDRB (ADHK 2000) Kota Depok yang berasal dari lapangan usaha listrik, gas & air minum adalah sebagaimana ditunjukkan dalam **Tabel II.3.a**. Sedangkan persentase PDRB lapangan usaha listrik, gas & air minum Kota Depok dibandingkan total PDRB Kota Depok adalah sebagaimana ditampilkan pada **Tabel II.3.b**.

Tabel II.3. a. PDRB Kota Depok (ADHK 2000) dari Lapangan Usaha Listrik, Gas & Air Minum (dalam juta rupiah)

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005
LISTRIK, GAS & AIR MINUM	126.236,53	131.126,70	138.496,57	146.341,60	157.837,97
Listrik	120.039,19	124.226,17	131.170,41	138.560,03	146.873,63
Gas	-	-	-	-	-
Air Bersih	6.197,34	6.900,53	7.326,16	7.781,57	10.964,34

Sumber : BPS, 2006

Tabel II.3. b. Persentase PDRB dari Lapangan Usaha Listrik, Gas & Air minum (ADHK 2000) di Kota Depok (dalam persen)

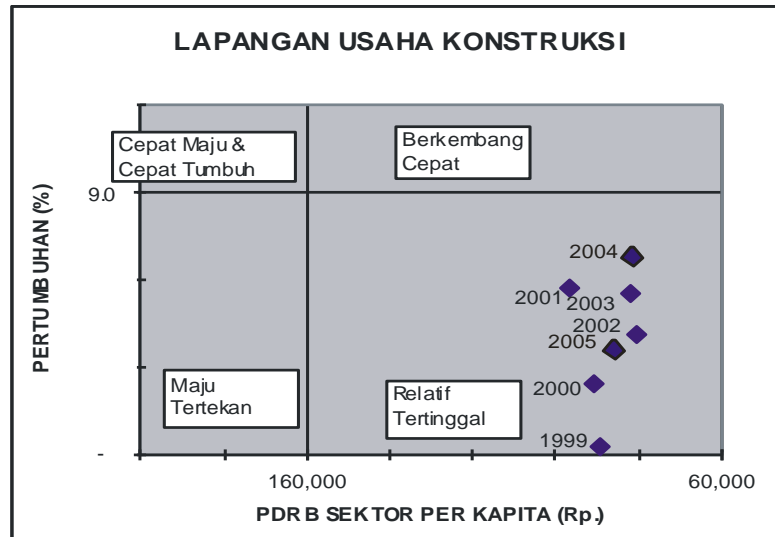
Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005
LISTRIK, GAS & AIR MINUM	3,42	3,35	3,33	3,31	3,33
Listrik	3,25	3,17	3,15	3,13	3,10
Gas	-	-	-	-	-
Air Bersih	0,17	0,18	0,18	0,18	0,23

Sumber : BPS, 2006

- **Bangunan/Konstruksi**

Lapangan usaha ini mencakup kegiatan pembangunan fisik (konstruksi), baik yang digunakan sebagai tempat tinggal (pemukiman) atau sarana lainnya yang dilakukan oleh perusahaan konstruksi maupun perorangan.

Lapangan usaha bangunan/konstruksi Kota Depok masih tertinggal dengan Jawa Barat, baik rata-rata pertumbuhannya maupun rata-rata PDRB. Sejak tahun 2002 sampai dengan 2005, pertumbuhan lapangan usaha bangunan/konstruksi di Kota Depok berada dibawah 6% per tahun (ADHK 2000), padahal rata-rata pertumbuhan lapangan usaha bangunan/konstruksi di Jawa Barat mencapai 9% per tahun. PDRB lapangan usaha bangunan/konstruksi di Kota Depok tahun 2005 sebesar Rp. 289.734,93 juta (ADHK 2000). Secara grafis, perbandingan lapangan usaha bangunan/konstruksi Jawa Barat dan Kota Depok dapat dilihat pada **Gambar II.5**.



Gambar II.5. Posisi Lapangan Usaha Konstruksi Kota Depok dibanding Jawa Barat

Perkembangan PDRB (ADHK 2000) Kota Depok yang berasal dari Lapangan usaha bangunan dan konstruksi adalah sebagaimana ditunjukkan dalam **Tabel II.4.a**. Sedangkan persentase PDRB lapangan usaha bangunan dan konstruksi Kota Depok dibandingkan total PDRB Kota Depok adalah sebagaimana ditampilkan pada **Tabel II.4.b**.

Tabel II.4.a. PDRB (ADHK 2000) Kota Depok dari Lapangan Usaha Konstruksi (dalam juta rupiah)

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005
BANGUNAN/KONSTRUKSI	245.483,27	254.911,08	269.033,15	284.053,85	289.734,93

Sumber : BPS, 2006

Tabel II.4. b. Persentase PDRB dari Lapangan Usaha Konstruksi (ADHK 2000) di Kota Depok (dalam persen)

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005
BANGUNAN/KONSTRUKSI	6,64	6,50	6,46	6,41	6,11

Sumber : BPS, 2006

2.1.3.3. Sektor Tersier.

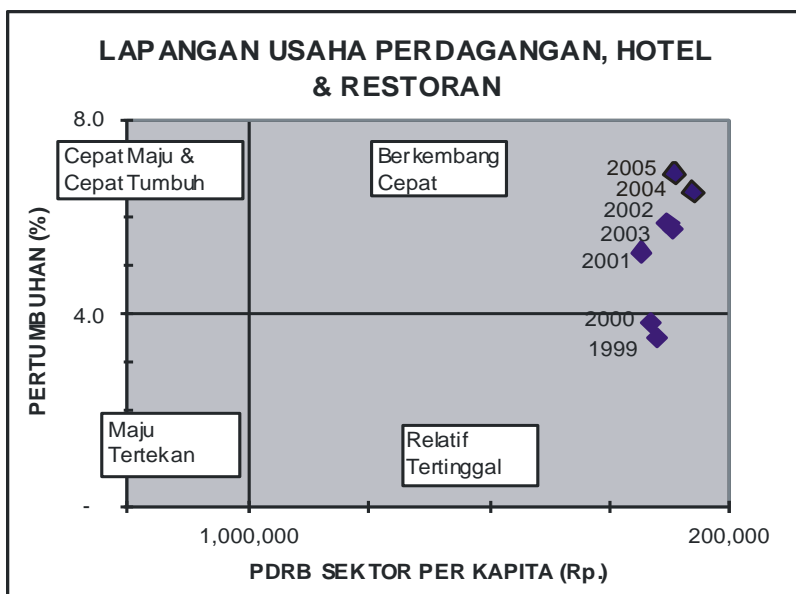
- **Perdagangan, Hotel dan Restoran**

Sebagai kota yang tinggi ekspor industri manufakturnya selama dasawarsa 1990–1999. Pada tahun 2003, nilai ekspor Kota Depok masih tercatat cukup tinggi. Beberapa komoditas di Kota

Depok sampai bulan Juni 2006 tercatat nilai ekspornya sebesar USD 227,829,906. Jumlah perusahaan perdagangan yang mempunyai SIUP tahun 2006 sekitar 1.196 perusahaan.

Arus kunjungan migran sirkuler dan wisatawan ke Kota Depok cukup banyak seiring dengan berkembangnya aktivitas ekonomi, terutama operasional perdagangan dan jasa di Kota Depok. Dalam rangka memenuhi permintaan sekaligus menjamin keamanan/kenyamanan pengunjung yang datang, maka pengusaha telah menyediakan hotel dan akomodasi lainnya di Kota Depok. Namun jumlah hotel dan akomodasi lainnya tidak berkembang secara pesat, mengingat Kota Depok sangat dekat dengan Ibukota Jakarta yang merupakan pusat niaga dan jasa terbesar di Indonesia dengan fasilitas dan akomodasi yang lebih baik dan lebih banyak. Pada tahun 2006 di Kota Depok tersedia 182 kamar hotel, terdiri dari 78 kamar hotel bintang 3; 54 kamar hotel bintang 2 dan 50 kamar hotel melati.

Ditinjau dari rata-rata pertumbuhan lapangan usaha perdagangannya, hotel & restoran Kota Depok berkembang cepat dibandingkan Jawa Barat. Sejak tahun 2001 sampai dengan 2005, hotel & restoran di Kota Depok berada di atas 5% per tahun (ADHK 2000), kecuali tahun 2002. Capaian ini berada diatas Jawa Barat yang hanya mencapai 4% per tahun. Dalam segi PDRB per kapita, lapangan usaha perdagangan, hotel & restoran di Kota Depok rata-rata mencapai Rp. 970.488,- (ADHK 2000) selama lima tahun terakhir ini, sedangkan rata-rata di Jawa Barat sebesar Rp. 1.000.000,- per kapita. Secara grafis, perbandingan lapangan usaha perdagangan, hotel & restoran Jawa Barat dan Kota Depok dapat dilihat pada **Gambar II.6**.



Gambar II.6. Posisi Lapangan Usaha Perdagangan, Hotel & Restoran Kota Depok dibanding Jawa Barat

Perkembangan PDRB (ADHK 2000) Kota Depok yang berasal dari lapangan usaha perdagangan, hotel & restoran adalah sebagaimana ditunjukkan dalam **Tabel II.5.a**. Sedangkan persentase PDRB lapangan usaha perdagangan, hotel & restoran Kota Depok dibandingkan total PDRB Kota Depok adalah sebagaimana ditampilkan pada **Tabel II.5.b**.

Tabel II.5.a. PDRB dari Lapangan Usaha Perdagangan, Hotel & Restoran (ADHK 2000) di Kota Depok (dalam juta rupiah)

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005
<i>PERDAG., HOTEL & RESTORAN</i>	<i>1.123.483,29</i>	<i>1.153.513,37</i>	<i>1.221.192,62</i>	<i>1.293.418,42</i>	<i>1.371.884,46</i>
Perdagangan Besar dan Eceran	915.386,46	937.596,39	992.914,58	1.051.953,48	1.125.590,22
Hotel	5.579,38	5.923,77	5.958,23	5.993,16	6.113,02
Restoran	202.517,45	209.993,21	222.319,81	235.471,78	240.181,22

Sumber : BPS, 2006

Tabel II.5. b. Persentase PDRB dari Lapangan Usaha Perdagangan, Hotel & Restoran (ADHK 2000) di Kota Depok

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005
<i>PERDAG., HOTEL & RESTORAN</i>	30,41	29,42	29,31	29,17	28,94

Sumber : BPS, 2006

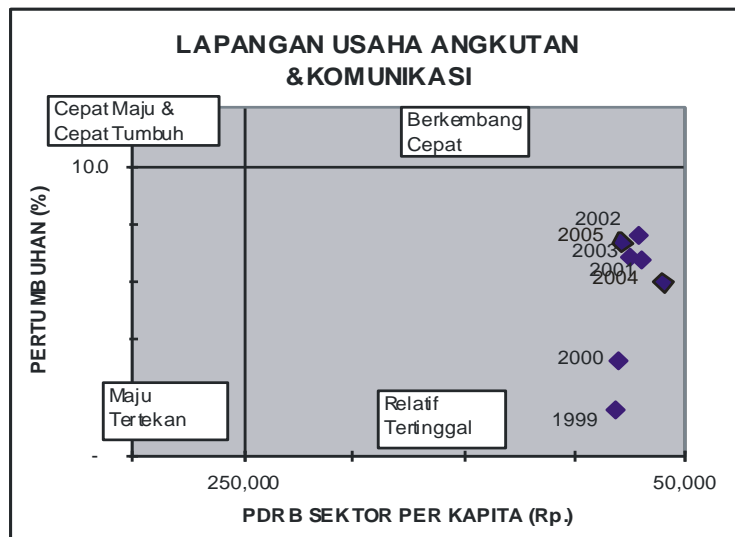
- **Angkutan dan Komunikasi**

Salah satu potensi Kota Depok adalah di sektor perhubungan. Lokasi Kota Depok yang dekat dengan ibukota dan banyaknya penduduk yang bekerja di Ibukota Jakarta, menyebabkan meningkatnya kegiatan perjalanan *commuter* (pulang-pergi). Sub sektor angkutan yang tersedia di Kota Depok hanya angkutan darat, salah satunya adalah angkutan massal kereta api.

Pada angkutan massal kereta api, jumlah penumpang kereta api yang menggunakan stasiun yang berada di Kota Depok sebesar 12.964.072 orang dan nilai karcis yang terjual sebesar Rp. 21.617.220.000,-.

Pada sub-sektor komunikasi yang mencakup kegiatan pos dan giro, telekomunikasi dan jasa penunjang telekomunikasi hingga tahun 2006 tercatat jumlah kantor pos pembantu di Kota Depok sebanyak 14 buah dengan pendapatan sebesar Rp. 5.169.037.227,-.

Lapangan usaha angkutan dan komunikasi Kota Depok relatif tertinggal dibandingkan Jawa Barat, baik rata-rata pertumbuhannya maupun rata-rata PDRB per kapitanya. Sejak tahun 2001 sampai dengan 2005 pertumbuhannya selalu dibawah 8% per tahun (ADHK 2000), kecuali tahun 2002 mencapai 15.38%, padahal rata-rata pertumbuhan di Jawa Barat mencapai 10% per tahun. Rata-rata PDRB per kapita lapangan usaha angkutan dan komunikasi di Kota Depok mencapai Rp. 176.101,- (ADHK 2000), sedangkan rata-rata PDRB lapangan usaha angkutan dan komunikasi di Jawa Barat mencapai Rp. 250.000,- per kapita. Secara grafis, perbandingan lapangan usaha angkutan dan komunikasi Jawa Barat dan Kota Depok dapat dilihat pada **Gambar II.7**.



Gambar II.7. Posisi Lapangan Usaha Angkutan & Komunikasi Kota Depok dibanding Jawa Barat

Perkembangan PDRB (ADHK 2000) Kota Depok yang berasal dari lapangan usaha angkutan dan komunikasi adalah sebagaimana ditunjukkan dalam **Tabel II.6.a**. Sedangkan persentase PDRB lapangan usaha angkutan dan komunikasi Kota Depok dibandingkan total PDRB Kota Depok adalah sebagaimana ditampilkan pada **Tabel II.6.b**.

Tabel II.6. b. Persentase PDRB dari Lapangan Usaha Angkutan & Komunikasi (ADHK 2000) di Kota Depok

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005
ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	4,94	7,00	5,40	5,43	5,48

Sumber : BPS, 2006

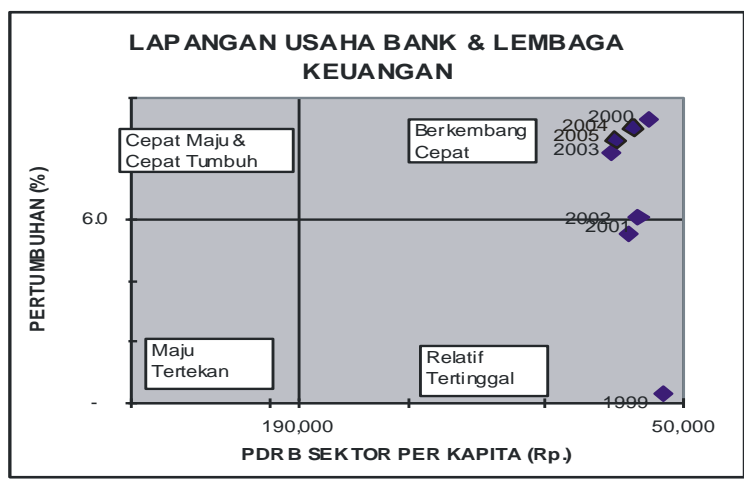
- **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**

Sub-sektor bank mencakup kegiatan yang memberikan jasa keuangan pada pihak lain seperti menerima simpanan terutama dalam bentuk giro dan deposito, memberikan kredit/pinjaman, baik jangka pendek, menengah maupun panjang, mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga, mendiskonto surat wesel/kertas dagang/surat hutang dan sejenisnya, menyewakan tempat menyimpan barang berharga dan sebagainya. Untuk pelayanan jasa keuangan tahun 2006, di Kota Depok terdapat lembaga keuangan formal bank sebanyak 21 bank dengan rincian: bank pemerintah 4 buah, bank swasta nasional 15 buah, bank daerah 2 buah, dan besaran dana yang ada seluruhnya Rp. 14.468.763.000,-.

Termasuk dalam sub-sektor lembaga keuangan lainnya adalah lembaga keuangan bukan bank, sewa bangunan, dan jasa perusahaan. Lembaga keuangan bukan bank meliputi kegiatan asuransi, dana pensiun, pegadaian, koperasi, simpan pinjam, lembaga pembiayaan, pedagang valuta asing, pasar modal dan jasa penunjang seperti pialang, penjamin emisi, dan sebagainya. Sewa bangunan meliputi kegiatan usaha persewaan bangunan, dan tanah, baik yang menyangkut bangunan tempat tinggal

maupun bukan tempat tinggal seperti perkantoran, pertokoan, serta usaha persewaan tanah persil. Jasa Perusahaan meliputi kegiatan memberikan jasa hukum (advokat dan notaris), jasa akuntansi dan pembukuan, jasa pengolahan dan peyajian data, jasa bangunan/arsitek dan teknik, jasa periklanan dan riset pemasaran serta jasa persewaan mesin dan peralatan.

Dibandingkan lapangan usaha bank & lembaga keuangan rata-rata di Jawa Barat, dari segi rata-rata pertumbuhannya selama empat tahun terakhir ini, lapangan usaha bank & lembaga keuangan di Kota Depok berkembang cepat. Rata-rata pertumbuhan lapangan usaha bank & lembaga keuangan di Jawa Barat sebesar 6% per tahun, sedangkan di Kota Depok diatas 7% per tahun (ADHK 2000), namun pada tahun 2005 menurun menjadi 5.69%. Rata-rata PDRB lapangan usaha bank & lembaga keuangan di Jawa Barat adalah Rp. 190.000,- per kapita, sedangkan di Kota Depok pada periode yang sama hanya mencapai Rp. 131.595,- dan rata-rata selama lima tahun (2001-2005) hanya Rp. 126.918,- (ADHK 2000). Secara grafis, perbandingan lapangan usaha bank & lembaga keuangan Jawa Barat dan Kota Depok dapat dilihat pada **Gambar II.8**.



Gambar II.8. Posisi Lapangan Usaha Bank & Lembaga Keuangan Kota Depok dibanding Jawa Barat

Perkembangan PDRB (atas dasar harga konstan 1993) Kota Depok yang berasal dari Lapangan usaha bank dan lembaga keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan dalam **Tabel II.7.a**. Sedangkan persentase PDRB lapangan usaha bank dan lembaga keuangan Kota Depok dibandingkan total PDRB Kota Depok adalah sebagaimana ditampilkan pada **Tabel II.7.b**.

Tabel II.7.a. PDRB Lapangan Usaha Bank dan Lembaga Keuangan (ADHK 2000) di Kota Depok (dalam juta rupiah)

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005
BANK & LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA	139.448,38	148.777,26	160.664,75	173.635,35	183.523,01
Bank	4.097,04	4.816,42	5.114,07	5.432,57	5.867,18
Lembaga Keuangan Bukan Bank	567,66	594,81	631,75	671,29	704,85
Sewa Bangunan	116.341,09	124.006,79	134.720,98	146.451,66	155.238,76
Jasa Perusahaan	18.442,59	19.359,24	20.197,95	21.079,83	21.712,22

Sumber : BPS, 2006

Tabel II.7.b. Persentase PDRB Lapangan Usaha Bank dan Lembaga Keuangan (ADHK 2000) di Kota Depok

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005
<i>BANK & LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA</i>	3,77	3,80	3,86	3,92	3,87

Sumber : BPS, 2006

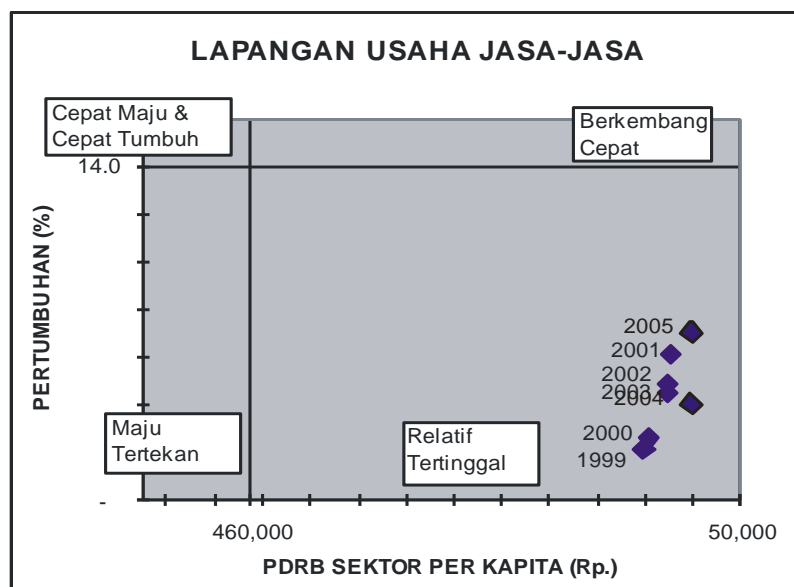
- **Jasa-jasa**

Lapangan usaha jasa-jasa dikelompokkan kedalam dua sub-sektor yaitu: sub-sektor jasa pemerintahan umum dan sub-sektor jasa swasta.

Jasa pemerintahan umum Kota Depok meliputi kegiatan jasa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok untuk kepentingan rumah tangga dan masyarakat umum. Sebagai contoh jasa pemerintahan umum, pertahanan dan keamanan, pelayanan publik dan sebagainya. Nilai tambah jasa pemerintahan umum dihitung dengan pendekatan pengeluaran pemerintah untuk belanja pegawai.

Jasa swasta meliputi kegiatan jasa yang dilaksanakan pihak swasta, misalnya jasa sosial dan kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi, serta jasa perorangan dan rumah tangga. Jasa sosial kemasyarakatan mencakup kegiatan jasa pendidikan, kesehatan, palang merah, panti asuhan, panti wreda, yayasan pemeliharaan anak cacat, rumah ibadat dan sejenisnya yang dikelola oleh swasta. Jasa hiburan dan rekreasi mencakup kegiatan jasa bioskop, kebun binatang, taman hiburan, pub, bar, karaoke, diskotik, kolam renang dan kegiatan hiburan lainnya. Jasa perorangan dan rumah tangga mencakup kegiatan yang pada umumnya melayani perorangan dan rumah tangga seperti jasa revarasi, pembantu rumah tangga, tukang cukur, tukang jahit, semir sepatu, salon kecantikan dan sejenisnya.

Dibandingkan lapangan usaha jasa-jasa rata-rata Jawa Barat, baik dari segi rata-rata pertumbuhannya maupun PDRB per kapita, selama lima tahun terakhir (2001-2005), lapangan usaha jasa-jasa di Kota Depok relatif tertinggal. Rata-rata pertumbuhan lapangan usaha jasa-jasa di Jawa Barat adalah 14% per tahun, sedangkan pertumbuhan lapangan usaha jasa-jasa di Kota Depok hampir selalu dibawah 8% per tahun (ADHK 2000). Demikian juga rata-rata PDRB lapangan usaha jasa-jasa per kapita di Jawa Barat mencapai Rp. 460.000,- per kapita, sedangkan rata-rata PDRB lapangan usaha jasa-jasa per kapita di Kota Depok hanya Rp. 257.510,- (ADHK 2000). Secara grafis, perbandingan lapangan usaha jasa-jasa Jawa Barat dan Kota Depok dapat dilihat pada **Gambar II.9**.



Gambar II.9. Posisi Lapangan Usaha Jasa-jasa Kota Depok dibanding Jawa Barat

Perkembangan PDRB (atas dasar harga konstan) Kota Depok yang berasal dari lapangan usaha jasa-jasa adalah sebagaimana ditunjukkan dalam **Tabel II.8.a**. Sedangkan persentase PDRB lapangan usaha jasa-jasa Kota Depok dibandingkan total PDRB Kota Depok adalah sebagaimana ditampilkan pada **Tabel II.8.b**.

Tabel II.8.a. PDRB Lapangan Usaha Jasa-jasa (ADHK 2000) di Kota Depok (dalam juta rupiah)

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005
JASA-JASA	296.744,96	312.192,16	327.129,86	342.927,92	356.430,19
<i>Pemerintahan Umum</i>	142.386,67	153.475,27	160.657,91	168.235,35	176.647,12
<i>Swasta</i>	154.358,29	158.716,89	166.471,95	174.692,57	179.783,07
<i>1. Sosial Kemasyarakatan</i>	45.401,34	46.682,49	49.833,56	53.223,56	55.884,74
<i>2. Hiburan dan Rekreasi</i>	3.119,18	3.694,81	3.835,21	3.982,09	4.061,73
<i>2. Perorangan dan Rumah tangga</i>	105.837,77	108.339,59	112.803,18	117.486,92	119.836,60

Sumber : BPS, 2006

Tabel II.8.b. Persentase PDRB Lapangan Usaha Jasa-jasa (ADHK 2000) di Kota Depok

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005
JASA - JASA	8,03	7,96	7,85	7,73	7,52

Sumber : BPS, 2006

2.1.4. Sosial Budaya dan Politik

Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan kota, aspek sosial dan budaya di Kota Depok juga berkembang dengan pesat. Perkembangan sosial dan budaya di Kota Depok meliputi: kualitas kehidupan beragama, kesejahteraan sosial, pendidikan dan budaya.

Berdasarkan agama dan kepercayaan, penduduk Kota Depok pada tahun 2006 yang menganut

agama Islam 91,94 %, selebihnya adalah Protestan 4,68%, Katolik 2,23%, Hindu 0,51%, Budha 0,63% dan Konghucu 0,01%. Jumlah tempat peribadatan di Kota Depok pada tahun 2006 yaitu 548 masjid, 1.139 mushola, 6 gereja Katolik, 121 gereja Protestan, dan 2 vihara.

Tingkat kesejahteraan sosial penduduk Depok dapat tercermin dari jumlah keluarga sejahtera yang ada di Kota Depok. Dari Total 26.823 keluarga yang ada di Kota Depok pada tahun 2006, sejumlah 7.684 keluarga diantaranya adalah keluarga pra-sejahtera dan 46.814 keluarga lainnya adalah keluarga sejahtera 1.

Aspek budaya merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan kota. Seperti umumnya kota metropolitan, budaya masyarakat Depok relatif bersifat terbuka dan wilayahnya memiliki daya tarik ekonomis bagi para pendatang. Jika dilihat dari sisi etnis, masyarakat Kota Depok tampak cukup heterogen, dengan kategori penduduk asli dan pendatang.

Pada saat ini kondisi sosial budaya masyarakat sangat dipengaruhi oleh perkembangan sosial budaya metropolitan. Budaya masyarakat Depok cukup unik karena merupakan refleksi gabungan kultur desa dan kota. Kultur yang menjadi potensi lokal diantaranya dalam bentuk seni budaya Betawi yang merupakan aset Kota Depok yang perlu dipelihara.

Secara kelembagaan sosial budaya, tercermin dalam bentuk lembaga sosial kemasyarakatan, pada tahun 2006 di Kota Depok terdapat antara lain: 63 kelompok Karang Taruna, 351 Petugas Sosial Masyarakat (PSM) dan 87 organisasi sosial, serta banyak lagi organisasi sosial kemasyarakatan yang terus tumbuh seiring dengan semangat demokratisasi.

2.1.5. Prasarana dan Sarana

- Prasarana Pendidikan.

Pada tahun ajaran 2006/2007 di Kota Depok terdapat 362 buah SD, dengan jumlah murid 108.403 orang dan jumlah guru sekitar 4.657 orang dan SLTP berjumlah 137 sekolah dengan jumlah murid 57.839 orang, jumlah guru 3.117 orang. Di tingkat SLTA terdapat 105 sekolah dengan jumlah murid dan guru masing-masing 33.663 orang dan 2.546 orang. Secara umum kondisi sarana prasarana sekolah, terutama sekolah negeri masih jauh dari memadai.

- Prasarana Kesehatan.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Depok tersedia beberapa fasilitas kesehatan. Tahun 2006 di Kota Depok terdapat 12 rumah sakit, 27 Puskesmas, 10 Puskesmas Pembantu, dan 1064 dokter praktek dengan rincian: 420 dokter umum, 238 dokter gigi, 416 dokter spesialis. Dengan tidak adanya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok menyebabkan tidak adanya rumah sakit rujukan bagi Puskesmas untuk dapat dirawat dengan pelayanan kesehatan yang lebih memadai. Saat ini pelayanan kesehatan diperoleh dari rumah sakit swasta melalui media kerjasama dengan pemerintah daerah, serta mengandalkan rujukan Rumah Sakit Umum di Kota Bogor dan Jakarta.

- **Fasilitas perumahan.**

Persentase lantai rumah bukan tanah di Kota Depok sebesar 96.86% dan jenis dinding yang terluas adalah tembok sebesar 99,57%, sedangkan tempat buang air besar 93,75% adalah WC sendiri.

2.1.6. Pemerintahan

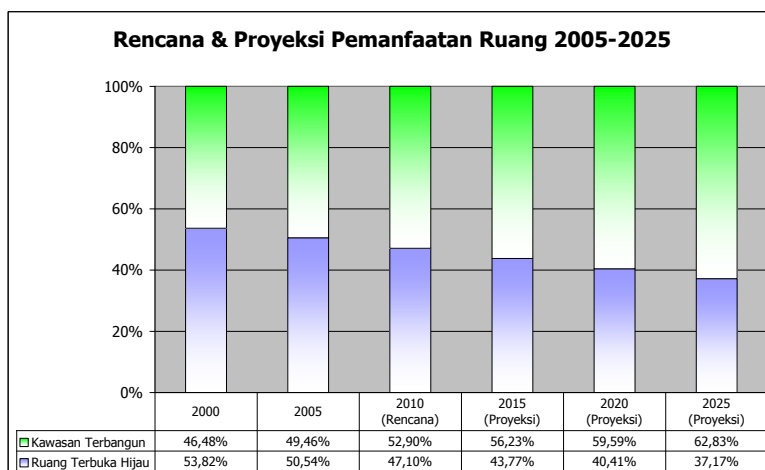
Pemerintahan adalah organisasi publik yang berfungsi mengelola pembangunan sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai aspirasi dan kebutuhannya. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dibentuk susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Depok yang meliputi 23 Lembaga Pemerintah, terdiri atas: 1 Kepala Daerah, 1 Wakil Kepala Daerah, 1 organisasi Sekretariat Daerah, 1 organisasi Sekretariat DPRD, 13 organisasi Dinas, 2 organisasi Badan, 5 organisasi Kantor, dan 6 Kecamatan. Selain itu terdapat pula organisasi DPRD dan KPUD. Kondisi struktur organisasi pemerintah daerah ini bersifat fleksibel serta dapat menyesuaikan dengan regulasi dan standar yang dibuat oleh pemerintah pusat, serta menyesuaikan kebutuhan pemerintah kota, sehingga jumlah dan jenis organisasi perangkat daerah dapat diubah sesuai kondisi dan kebutuhan.

Pada tahun 2006 Kota Depok memiliki 6 kecamatan dengan 63 kelurahan yaitu: Kecamatan Sawangan 14 kelurahan, Pancoran Mas 11 kelurahan, Sukmajaya 11 kelurahan, Cimanggis 13 kelurahan, Beji 6 kelurahan dan Limo 8 kelurahan. Kedepan dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat akan dikembangkan menjadi 11 (sebelas) kecamatan.

2.2. Tantangan

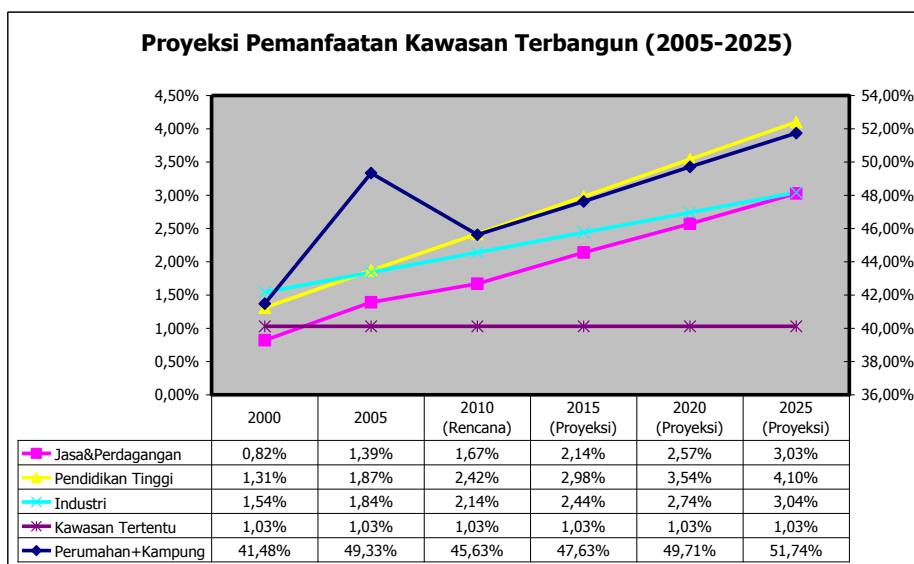
2.2.1. Kondisi Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

Kota Depok secara geografis memiliki letak yang cukup strategis dan memiliki tingkat mobilitas penduduk yang tinggi dengan jumlah penduduk mencapai 1.420.480 jiwa pada tahun 2006. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan akan ruang meningkat, diproyeksikan kawasan terbangun sampai dengan tahun 2025 akan meluas melebihi 60% luas kota. Ruang terbuka (hijau) akan menyusut kurang dari 40% luas kota. Proyeksi perbandingan antara kawasan terbangun dan ruang terbuka di Kota Depok dapat dilihat pada **Gambar II.10**.



Gambar II.10. Proyeksi Perbandingan antara Kawasan Terbangun dan Ruang Terbuka di Kota Depok

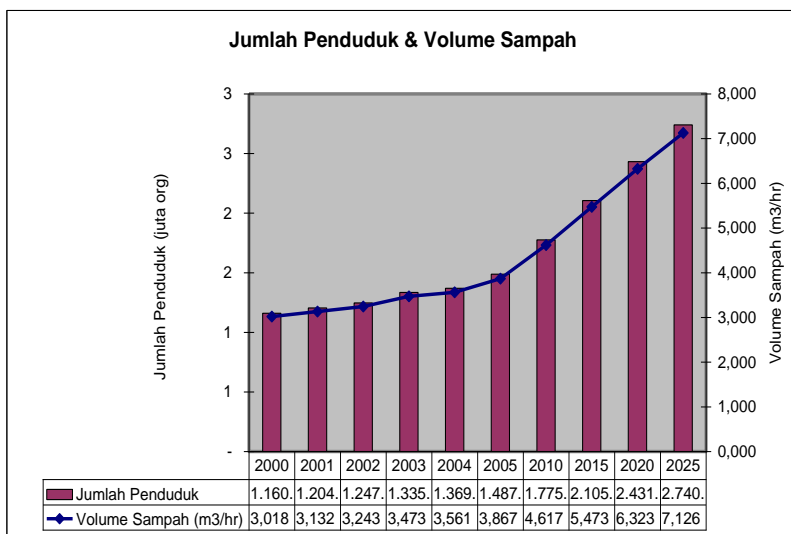
Diprediksikan pada tahun 2025, dari total luas kota yang menjadi kawasan terbangun, lebih dari separuhnya akan tertutup oleh perumahan & perkampungan. Jasa dan perdagangan akan menutupi 3,03% total luas kota, industri 3,04% total luas kota, pendidikan tinggi 4,10% total luas kota, dan kawasan tertentu 1,03% total luas kota. Meningkatnya jumlah tutupan permukaan tanah tersebut, ditambah dengan berubahnya fungsi saluran irigasi menjadi saluran drainase diprediksikan akan menyebabkan terjadinya genangan dan banjir di beberapa kawasan utama, yang berdampak terhadap penurunan kondisi Kota Depok. Proyeksi pemanfaatan kawasan terbangun di Kota Depok dapat dilihat **Gambar II.11**.



Gambar II.11. Proyeksi Pemanfaatan Kawasan Terbangun di Kota Depok

Berkenaan dengan persampahan, dengan asumsi timbulan sampah adalah 2,6 liter/orang/hari (Bapeda Kota Depok, *Kinerja Kota Depok: Capaian Pelaksanaan Pembangunan 2000-2004*), maka prediksi volume sampah yang dihasilkan Kota Depok adalah 4.617 m³ per hari pada tahun 2010, kemudian meningkat menjadi 7.126 m³ per hari pada tahun 2025. Volume sampah sebesar itu, tidak akan tertampung dengan sistem yang ada saat ini. Perlu sistem pemusnahan sampah yang

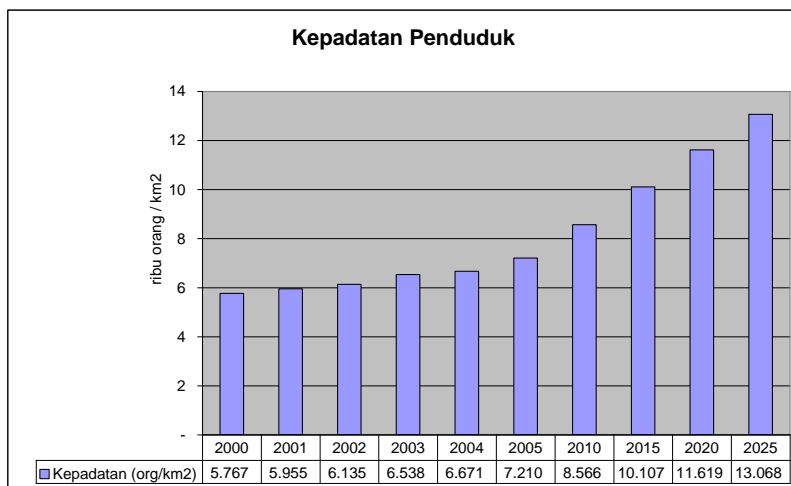
berkapasitas lebih besar, ramah lingkungan dan bersinergi dengan pola komposting. Ilustrasi grafis mengenai pertumbuhan jumlah penduduk dan volume sampah dapat dilihat pada **Gambar II.12**.



Gambar II.12. Proyeksi Jumlah Penduduk & Volume Sampah di Kota Depok

2.2.2. Kondisi Demografi

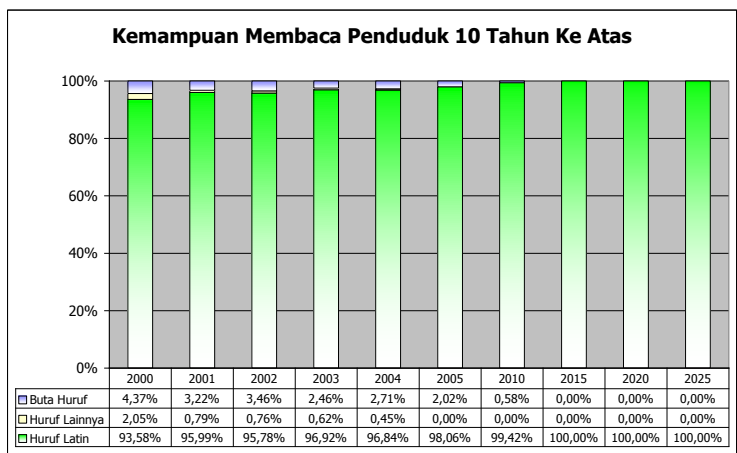
Dengan tingkat pertumbuhan jumlah penduduk rata-rata 3,5% pertahun, diprediksikan pada tahun 2010 kepadatan penduduk Kota Depok akan mencapai 8.566 orang per kilometer persegi. Angka ini akan terus meningkat menjadi 10.107 orang per kilometer persegi pada tahun 2015, 11.619 orang per kilometer persegi pada tahun 2020 dan 13.068 orang per kilometer persegi pada tahun 2025. Perkembangan kepadatan penduduk dari tahun 2000 dan proyeksinya pada tahun 2010, 2015, 2020 dan 2025 dapat dilihat pada **Gambar II.13**.



Gambar II.13. Proyeksi Kepadatan Penduduk di Kota Depok

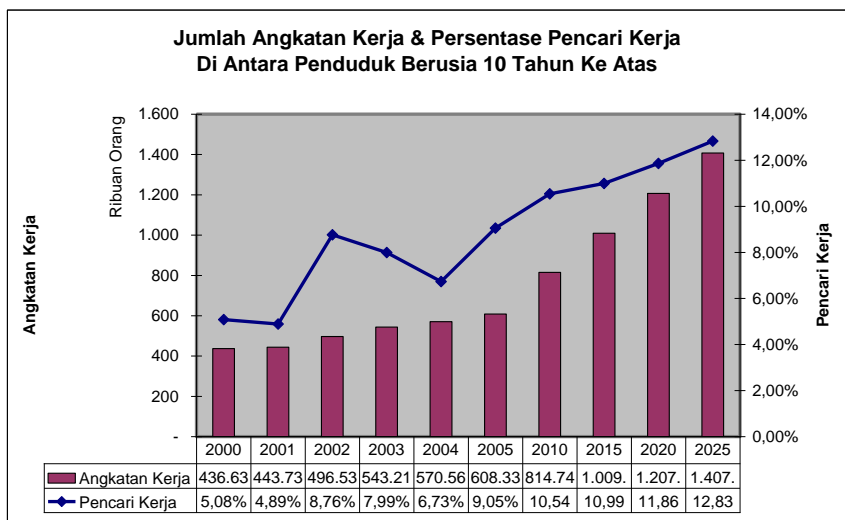
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Kota Depok cenderung meningkat setiap tahunnya. Rata-rata Lama Sekolah penduduk Kota Depok yang pada tahun 2000 mencapai 9,05 tahun, meningkat terus mencapai 10,6 tahun pada tahun 2006. Kemampuan membaca penduduk Kota Depok terus meningkat dari tahun ke tahun, diperkirakan pada tahun 2010 penduduk yang buta huruf tinggal

0,5% saja, dan pada tahun 2015 dan seterusnya sudah tidak ada penduduk Kota Depok yang buta huruf (lihat **Gambar II.14.**). Perkembangan tingkat pendidikan penduduk ini, perlu diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan tersebut di masa mendatang, sehingga partisipasi dan produktivitas penduduk dalam pembangunan dapat meningkat.



Gambar II.14. Proyeksi Kemampuan Membaca Penduduk di Kota Depok

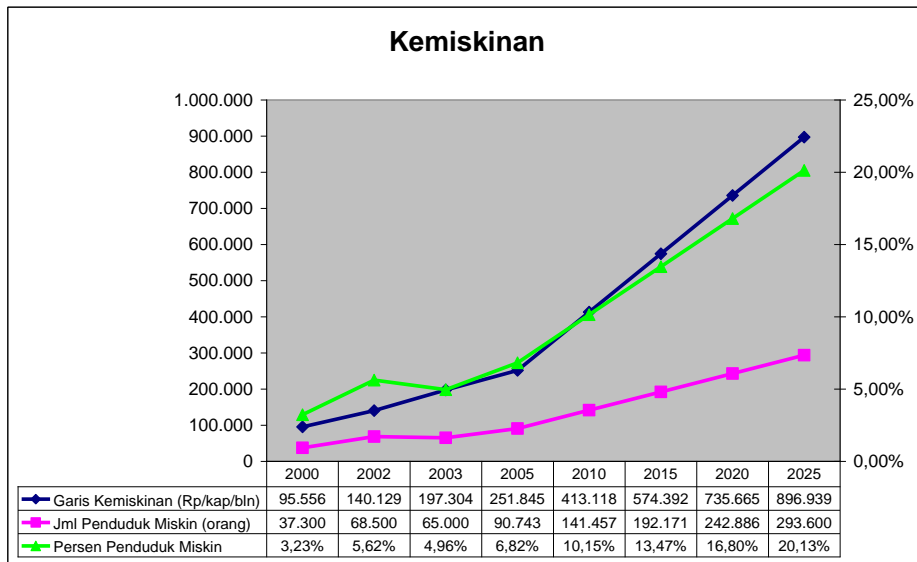
Diprediksi jumlah angkatan kerja dan pencari kerja di Kota Depok akan meningkat sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduknya. Diproyeksikan angkatan kerja yang sekarang berjumlah sekitar 600 ribu orang akan meningkat menjadi sekitar 800 ribu orang pada tahun 2010, meningkat terus menjadi sekitar satu juta orang pada tahun 2015, selanjutnya menjadi 1,2 juta orang pada tahun 2020 dan pada tahun 2025 menjadi 1,4 juta orang. Sementara itu, persentase pencari kerja yang saat ini sekitar 9% dari angkatan kerja, diprediksikan akan menjadi 10,54% pada tahun 2010, meningkat lagi menjadi 11% pada tahun 2015, dan 11,86% pada tahun 2020 serta 12,83% pada tahun 2025. Grafik pertumbuhan jumlah angkatan kerja dan persentase pencari kerja dapat dilihat pada **Gambar II.15.**



Gambar II.15. Proyeksi Jumlah Angkatan Kerja dan Persentase Pencari Kerja di Kota Depok

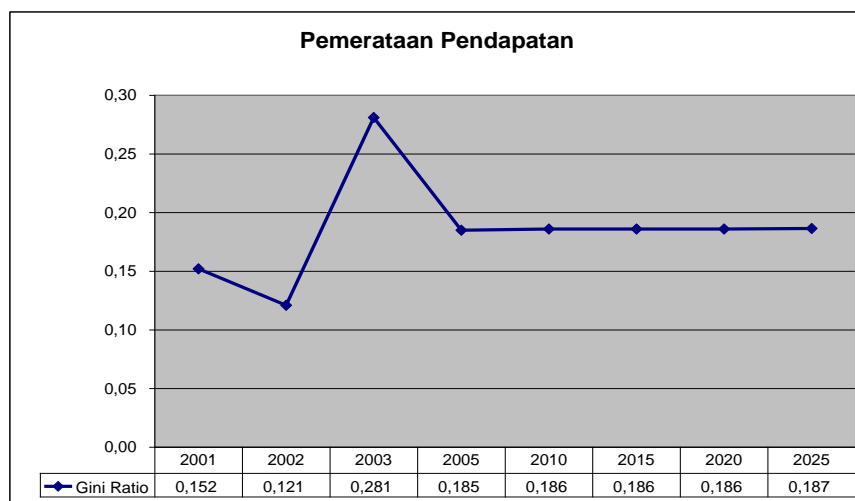
Diprediksikan batas garis kemiskinan di Kota Depok yang sekarang sekitar Rp. 250.000/kapita/bulan akan meningkat menjadi Rp. 413.000/kapita/bulan pada tahun 2010, kemudian

meningkat lagi menjadi Rp. 575.000/kapita/bulan pada tahun 2015 dan menjadi Rp. 735.000 /kapita/bulan pada tahun 2020 serta Rp. 897.000 /kapita/bulan pada tahun 2025. Akibatnya jumlah dan persentase penduduk miskin akan meningkat juga. Diperkirakan pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin di Kota Depok yang sekarang 90.700 orang (6,82%) akan mencapai 141.000 orang (10,15%) pada tahun 2010, dan akan bertambah menjadi 192.000 (13,47%) orang pada tahun 2015, kemudian bertambah lagi menjadi 242.800 orang (16,8%) pada tahun 2020 dan menjadi 293.600 orang (20,13%) pada tahun 2025. Grafik jumlah dan persentase penduduk miskin disajikan pada **Gambar II.16**.



Gambar II.16. Proyeksi Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Depok

Diperkirakan ketimpangan pendapatan di Kota Depok dimasa depan akan lebih buruk daripada dua tahun atau tiga tahun yang lalu. Pemerataan pendapatan yang diukur dengan indikator gini ratio, menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan dua atau tiga tahun yang lalu lebih baik dari pada saat ini. Pemerataan pendapatan di Kota Depok dimasa depan kemungkinan besar minimum akan sama dengan sekarang atau lebih buruk lagi. Grafik perkembangan gini ratio yang mengukur pemerataan pendapatan di Kota Depok dapat dilihat pada **Gambar II.17**.

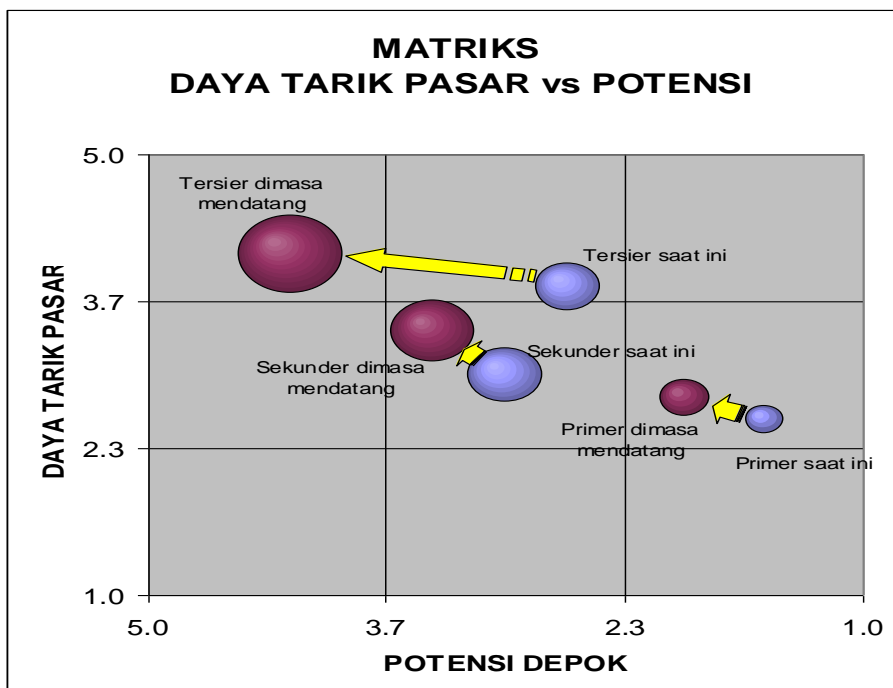


Gambar II.17. Proyeksi Pemerataan Pendapatan di Kota Depok

2.2.3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Berdasarkan teknik GE Matrix yang dikembangkan ahli-ahli manajemen di perusahaan GE, struktur ekonomi Kota Depok dapat dianalisis dan diprediksikan dengan baik secara grafis. GE Matrix banyak dipergunakan di berbagai perusahaan (*corporate*) untuk menganalisis portfolio bisnis. Grafis matriks ini terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu Y mencerminkan daya tarik pasar dan sumbu X mencerminkan potensi yang dimiliki perusahaan atau *corporate*. Dengan memposisikan Kota Depok sebagai suatu *corporate* dan sektor-sektor (Primer, Sekunder, Tersier) sebagai satuan bisnis, maka dapat dilihat kondisi masing-masing bisnis ditinjau potensinya dan daya tarik pasarnya.

Gambar II.18. Matriks GE Untuk Sektor-Sektor Ekonomi di Kota Depok

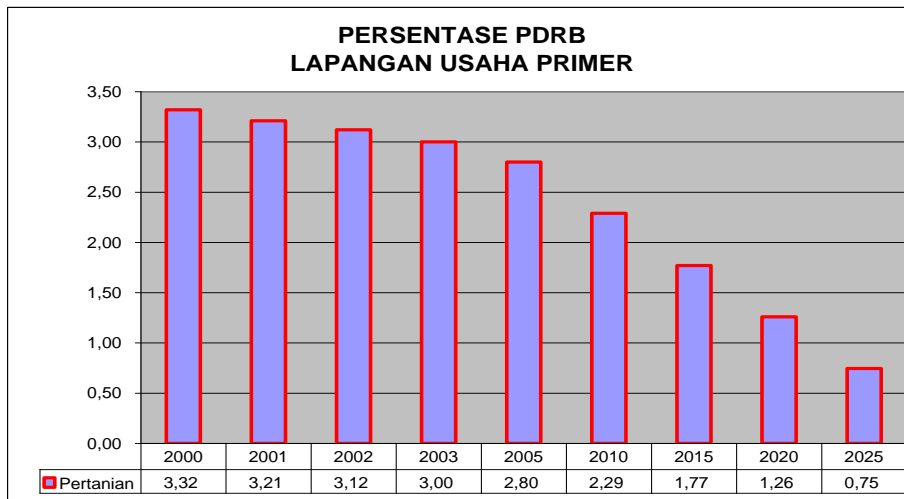


2.2.3.1. Sektor Primer

Sektor primer di Kota Depok hanya terdiri dari lapangan usaha pertanian dalam arti luas. Pertanian dalam arti luas termasuk di dalamnya usaha peternakan, perikanan dan perkebunan. Sektor primer yang berupa lapangan usaha pertambangan dan penggalian tidak terdapat di Kota Depok.

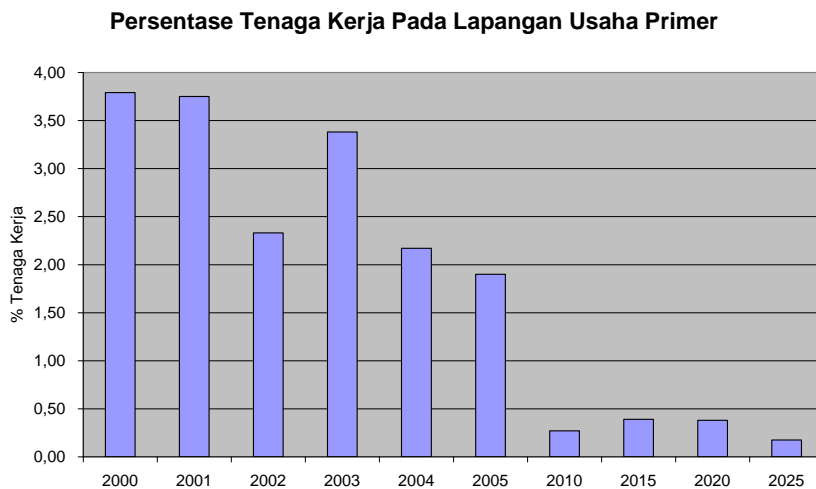
Diperkirakan persentase PDRB sektor primer Kota Depok yang sekarang ini hanya 3,52% dari total PDRB, akan semakin kecil dimasa mendatang. Pada tahun 2010 diperkirakan PDRB sektor primer di Kota Depok hanya mencapai 2,29% dari total PDRB dan akan menurun menjadi 1,77% pada tahun 2015, dan menurun lagi menjadi 1,26% pada tahun 2020 kemudian menjadi 0,75% pada tahun 2025.

Grafik perkembangan persentase PDRB sektor primer di Kota Depok dapat dilihat pada **Gambar II.19.**



Gambar II.19. Perkembangan Persentase PDRB Sektor Primer di Kota Depok

Sebagaimana persentase PDRB sektor primer, persentase angkatan kerja Kota Depok yang bergerak di sektor primer diperkirakan akan semakin kecil dimasa mendatang. Selama periode tahun 2010 sampai 2025 diperkirakan tenaga kerja yang bekerja di sektor primer mengalami penurunan yang cukup signifikan. Grafik perkembangan persentase tenaga kerja sektor primer di Kota Depok dapat dilihat pada **Gambar II.20.**

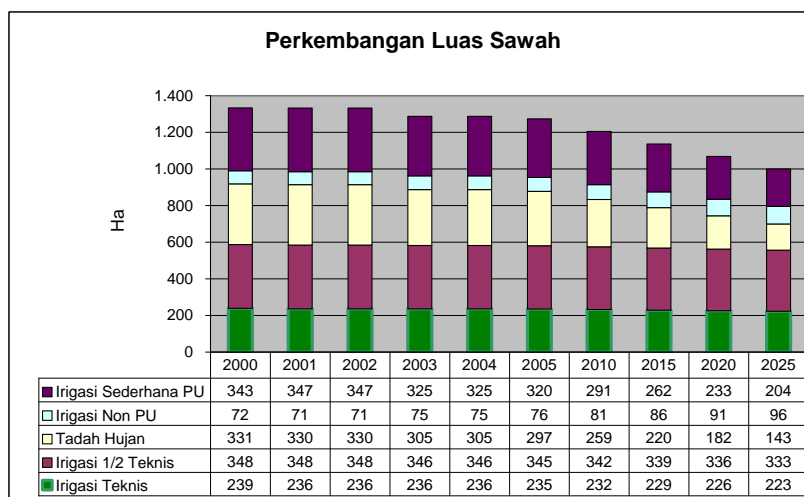


Gambar II.20. Perkembangan Persentase PDRB Sektor Primer di Kota Depok

- Pertanian

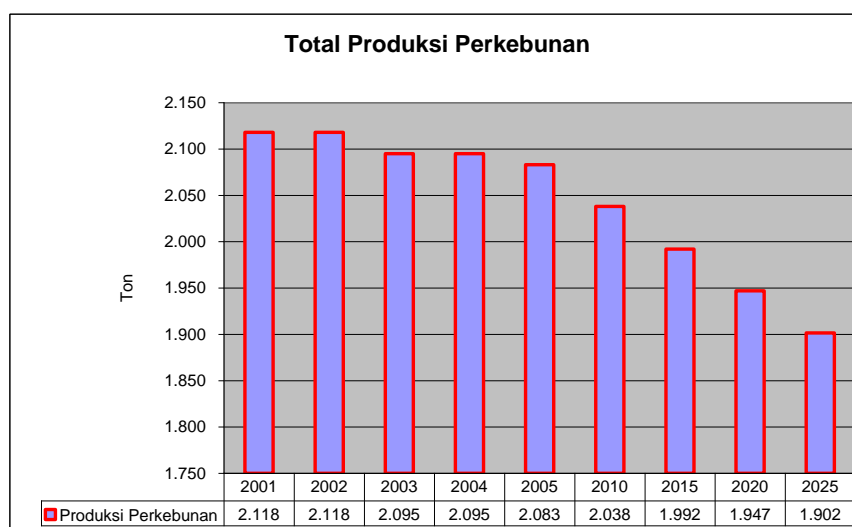
Diperkirakan pembangunan pertanian tanaman pangan di Kota Depok di masa depan akan menghadapi masalah utama berupa lahan sawah yang semakin menyempit. Pada tahun 2025 diperkirakan lahan sawah yang merupakan sumber daya alam utama bagi tanaman pangan, akan menjadi mengalami penyempitan dibandingkan sekarang. Penyempitan yang paling parah terjadi pada lahan sawah tadah hujan, disusul sawah irigasi sederhana.

Grafik perkembangan luas sawah di Kota Depok dapat dilihat pada **Gambar II.21.**



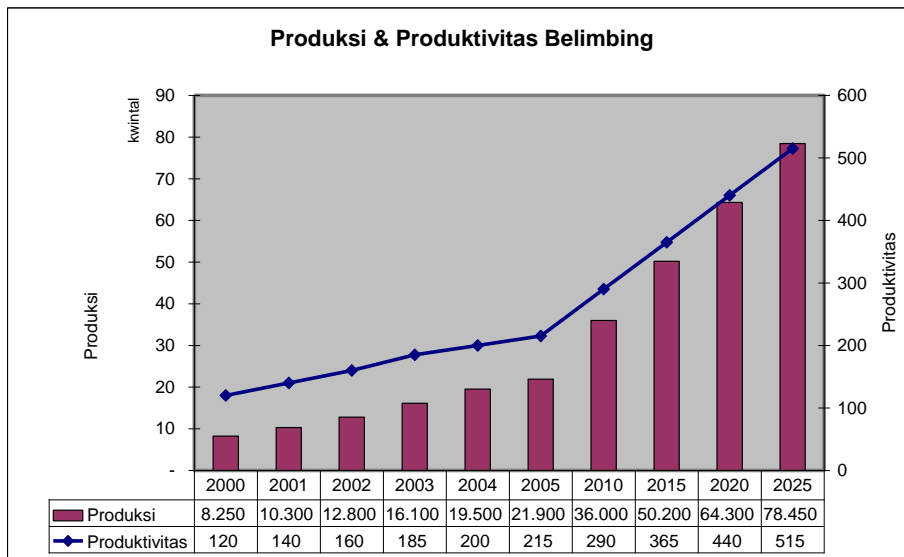
Gambar II.21. Perkembangan Luas Sawah di Kota Depok

Pembangunan pertanian perkebunan di Kota Depok diperkirakan akan menghadapi masalah yang lebih berat dibandingkan pertanian tanaman pangan. Selain menghadapi penyempitan lahan, tanaman perkebunan juga menghadapi masalah penurunan produktivitas. Dengan luas lahan yang relatif tetap selama lima tahun terakhir, produksi perkebunan menurun dari 2.118 ton pada tahun 2001 menjadi 2,083 ton pada tahun 2005. Penurunan produksi ini, jika kelak dibarengi dengan penyempitan lahan akan menjadi semakin parah. Perkembangan penurunan produksi tanaman perkebunan dapat dilihat pada **Gambar II.22**.



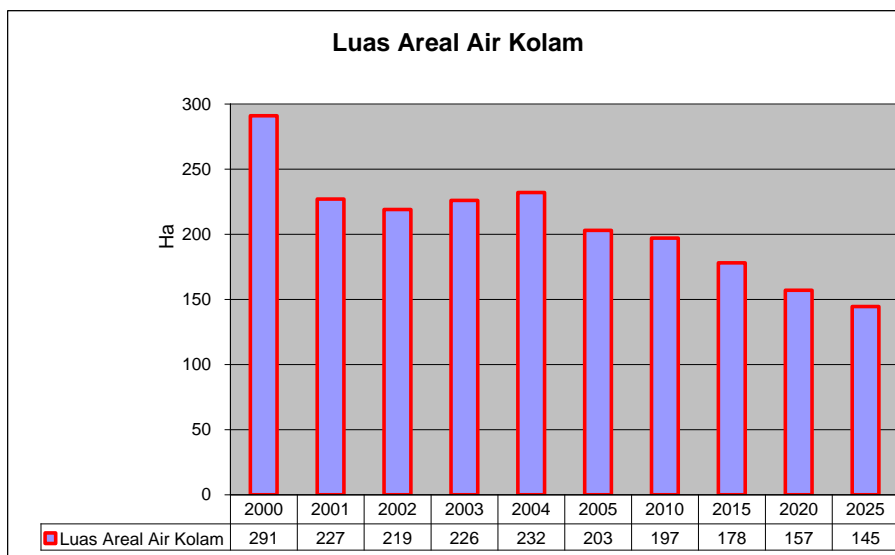
Gambar II.22. Perkembangan Produksi Perkebunan di Kota Depok

Teknik pertanian perkotaan yang selama lima tahun terakhir memberikan kemajuan luar biasa pada tanaman buah belimbing, diperkirakan akan mencapai titik jenuh dan tidak bisa berkembang terus tanpa penambahan lahan. Jika diasumsikan bahwa teknologi pertanian perkotaan dapat mengatasi kendala keterbatasan lahan maka proyeksi perkembangan pertanian buah belimbing adalah sebagaimana disajikan secara grafik pada **Gambar II.23**.



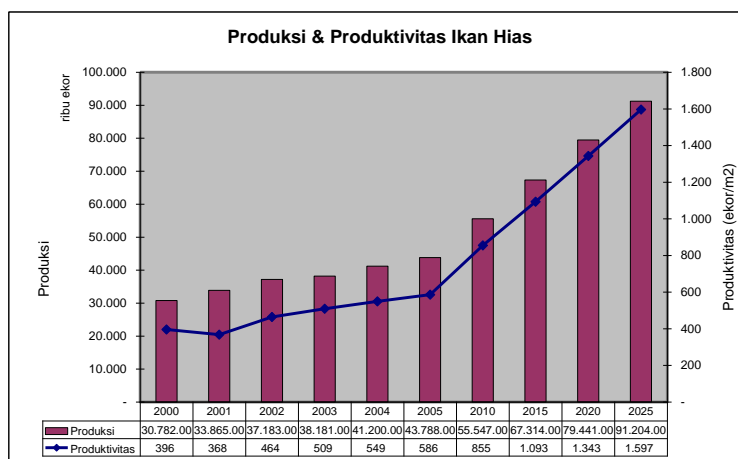
Gambar II.23. Perkembangan Produksi Buah Belimbing di Kota Depok

Pembangunan perikanan di Kota Depok juga menghadapi masalah yang sama dengan pertanian tanaman pangan, yaitu penyempitan lahan air kolam. Saat ini luas areal air kolam tinggal 60% dibandingkan luas areal air pad tahun 2000. Diperkirakan hingga tahun 2025 areal air kolam di Kota Depok akan terus mengalami penyempitan dibandingkan kondisi saat ini. Perkembangan luas areal air kolam dapat dilihat pada **Gambar II.24.**



Gambar II.24. Perkembangan Luas Areal Air Kolam di Kota Depok

Sebagaimana pertanian perkebunan, teknik pertanian perkotaan yang selama lima tahun terakhir memberikan kemajuan luar biasa pada perkembangan ikan hias, diperkirakan akan mencapai titik jenuh dan tidak bisa berkembang terus tanpa penambahan lahan. Jika diasumsikan bahwa teknologi pertanian perkotaan dapat mengatasi kendala keterbatasan lahan maka proyeksi perkembangan ikan hias adalah sebagaimana diilustrasikan grafik pada **Gambar II.25.**



Gambar II.25. Perkembangan Produksi Ikan Hias di Kota Depok

Pengusahaan ternak, padang rumput untuk pengembalaan ternak (terutama ternak besar sapi, kerbau dan kuda) di Kota Depok saat ini dan dimasa mendatang tidak akan tersedia, sehingga sangat kecil peluang untuk pengembangan ternak besar dengan cara pengembalaan baik saat ini maupun dimasa mendatang.

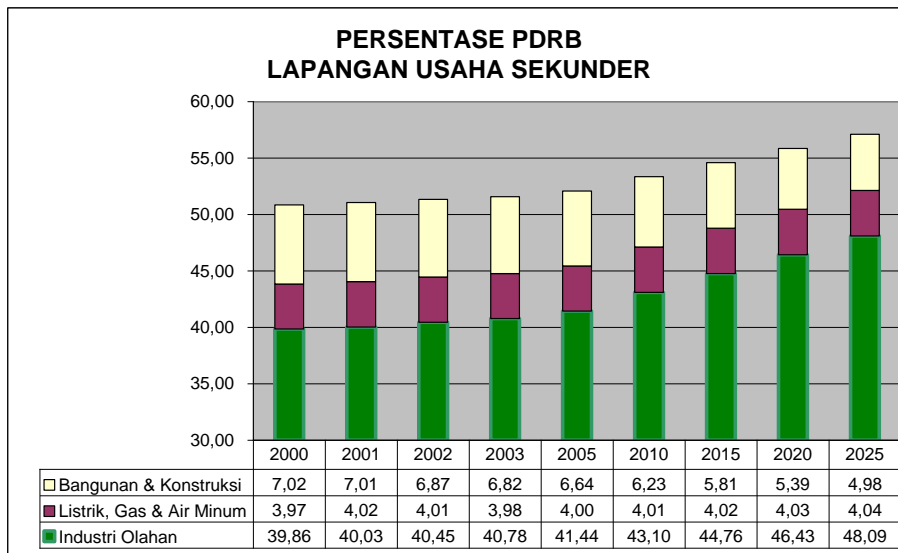
- **Pertambangan/Penggalian**

Sampai saat ini belum ditemukan potensi bahan tambang/galian di wilayah Kota Depok. Dimasa depan, sangat kecil kemungkinannya akan ditemukan potensi tersebut di Kota Depok.

2.2.3.2. Sektor Sekunder

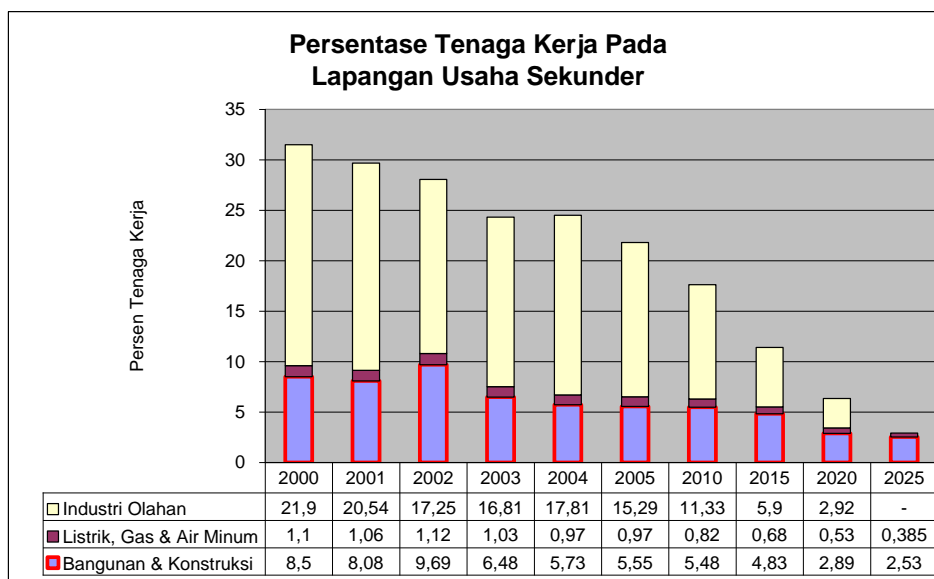
Sektor sekunder di Kota Depok terdiri dari lapangan usaha industri pengolahan, lapangan usaha listrik, gas dan air minum, serta lapangan usaha konstruksi.

Diperkirakan persentase PDRB sektor sekunder Kota Depok yang sekarang ini sekitar 50,67% dari total PDRB, akan semakin besar dimasa mendatang. Ini berarti kontribusi sektor sekunder terhadap total struktur ekonomi Kota Depok akan semakin besar perannya. Pada tahun 2010 diperkirakan kontribusi PDRB sektor sekunder di Kota Depok akan mencapai 53,54% dari total PDRB dan akan meningkat perannya menjadi 54,59% pada tahun 2015, dan meningkat lagi menjadi 55,83% pada tahun 2020, kemudian menjadi 57,11% pada tahun 2025. Grafik perkembangan persentase PDRB sektor sekunder di Kota Depok dapat dilihat pada **Gambar II.26**.



Gambar II.26. Perkembangan Persentase PDRB Sektor Sekunder di Kota Depok

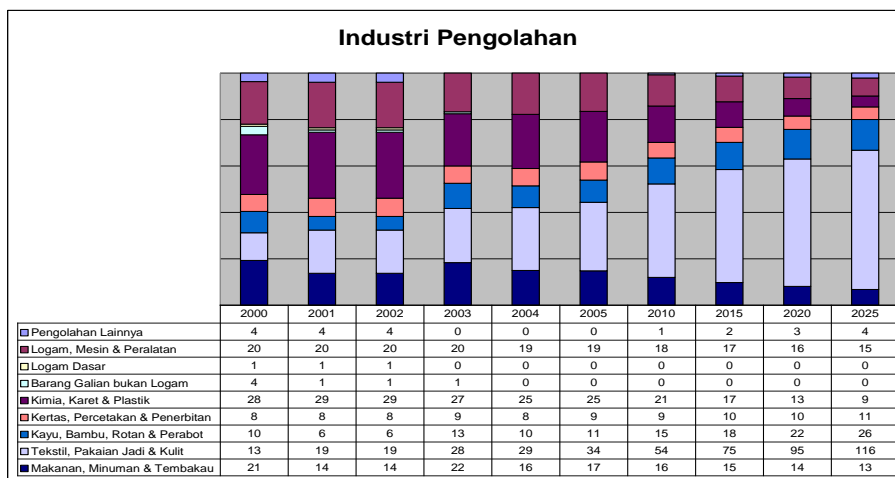
Berbeda dengan kontribusi PDRB sektor sekunder yang semakin meningkat, persentase angkatan kerja Kota Depok yang bergerak di sektor sekunder diperkirakan akan semakin kecil dimasa mendatang. Tenaga kerja sektor sekunder yang saat ini mencapai 21.81 % dari total angkatan kerja di Kota Depok, pada tahun 2010 diperkirakan akan turun menjadi sekitar 17% dari total angkatan kerja dan akan turun lagi menjadi sekitar 11% pada tahun 2015 kemudian menjadi hanya sekitar 6% pada tahun 2020 dan pada tahun 2025 akan berada di bawah 5%. Penyebab utama fenomena ini diperkirakan karena adanya proses de-industrialisasi secara global akibat meningkatnya secara drastis efisiensi mesin-mesin dan teknologi produksi pada industri pengolahan. Grafik perkembangan persentase tenaga kerja sektor sekunder di Kota Depok dapat dilihat pada **Gambar II.27**.



Gambar II.27. Perkembangan Persentase Tenaga Kerja Sektor Sekunder di Kota Depok

- Industri Pengolahan

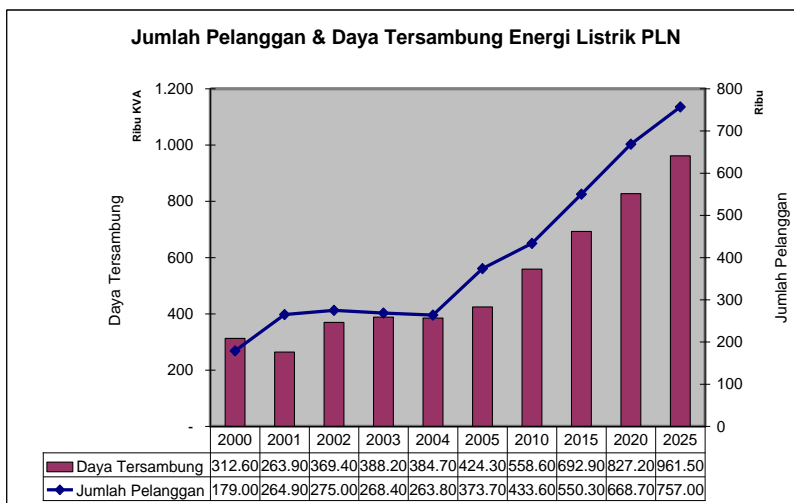
Industri pengolahan yang didominasi oleh industri tekstil, pakaian jadi dan kulit, diperkirakan akan meningkat jumlahnya di Kota Depok. Perkembangan jumlah perusahaan industri pengolahan di Kota Depok dapat dilihat pada **Gambar II.28**.



Gambar II.28. Perkembangan Jumlah Perusahaan Industri Pengolahan di Kota Depok

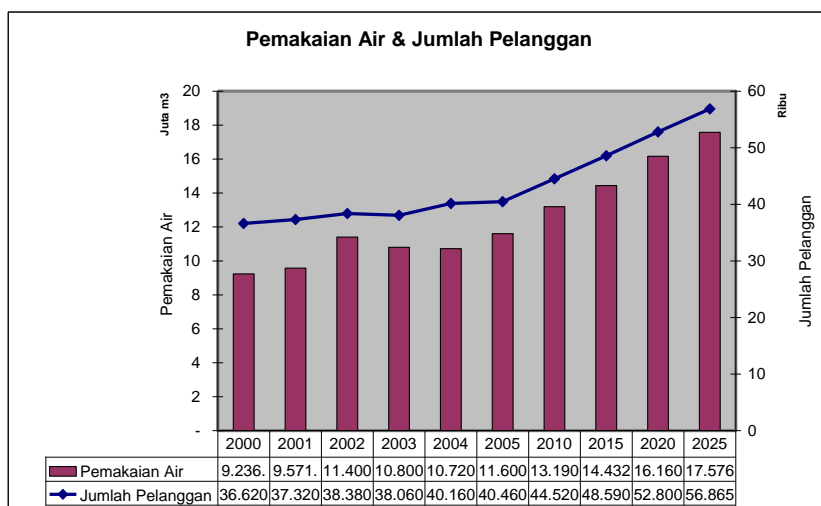
- Listrik, Gas dan Air Minum

Industri energi listrik di Kota Depok akan menjadi semakin penting dimasa mendatang. Perbaikan teknologi dan peningkatan efisiensi perangkat listrik rumah tangga dan perangkat listrik pada industri diperkirakan belum akan mengurangi kebutuhan energi listrik. Perkembangan jumlah pelanggan dan daya tersambung energi listrik PLN dapat dilihat pada **Gambar II.29**.



Gambar II.29. Perkembangan Jumlah Pelanggan dan Daya Tersambung di Kota Depok

Penyediaan air minum di Kota Depok, diperkirakan akan mirip dengan penyediaan listrik dari PLN. Jumlah pelanggan dan pemakaian air minum Kota Depok diperkirakan akan meningkat terus, oleh karena itu pengelolaan air minum perlu dievaluasi dan dikembangkan sesuai peningkatan pasar. Perkembangan jumlah pelanggan dan pemakaian air di Kota Depok dapat dilihat pada **Gambar II.30**.



Gambar II.30. Perkembangan Jumlah Pemakaian dan Pelanggan Air Minum di Kota Depok

- **Bangunan/Konstruksi**

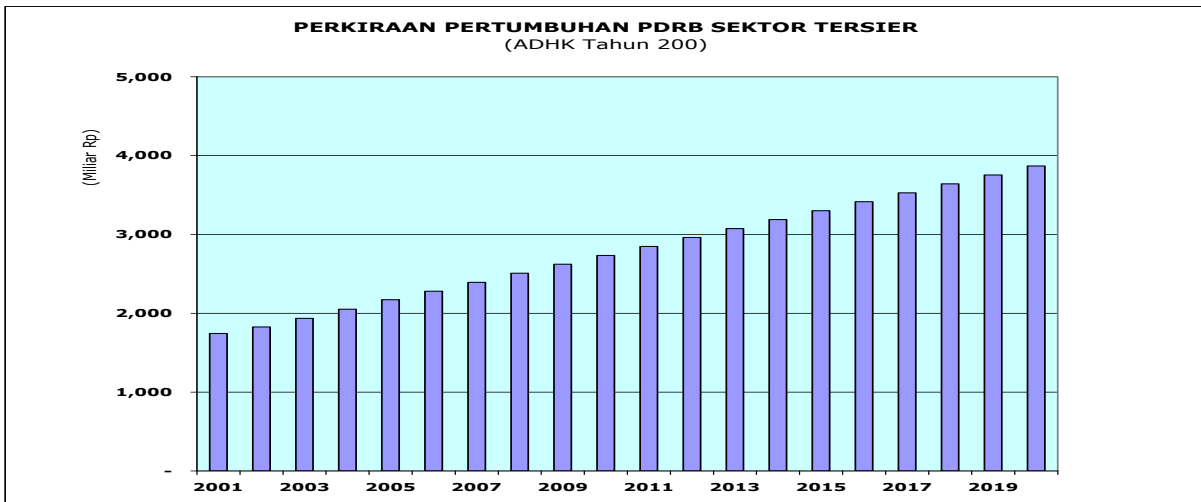
Perkembangan PDRB (atas dasar harga konstan 1993) Kota Depok yang berasal dari Lapangan usaha bangunan dan konstruksi menurun terus. PDRB lapangan usaha konstruksi di Kota Depok yang pada tahun 1997 mencapai Rp. 118 milyar menurun terus menjadi Rp. 105 milyar pada tahun 2003. Demikian juga kontribusinya terhadap total PDRB Kota Depok terus menurun. Pada tahun 1997 PDRB lapangan usaha bangunan dan konstruksi Kota Depok mencapai 7,16% dari total PDRB, pada tahun 2001 menurun menjadi 7,01% dan pada tahun 2003 hanya tinggal 6,82% saja. Diperkirakan lapangan usaha ini akan terus menurun apabila tidak ada program konstruksi yang cukup besar di Kota Depok.

2.2.3.3. Sektor Tersier

Sektor tersier terdiri dari lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran, lapangan usaha angkutan dan komunikasi, lapangan usaha bank & lembaga keuangan lainnya, serta lapangan usaha Jasa-jasa.

Selama kurun waktu lima tahun (2001-2005), PDRB sektor tersier menunjukkan pola peningkatan, demikian pula dengan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) meskipun terjadi fluktuasi di awal periode diperkirakan hingga tahun 2025 mendatang pola pertumbuhan PDRB dan LPE sektor tersier akan menunjukkan pola kecenderungan yang sama. Pada tahun 2010 diperkirakan PDRB sektor tersier di Kota Depok akan mencapai Rp. 2.73 triliun dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rp. 3,87 triliun pada tahun 2025. Ini berarti selama kurun waktu ini PDRB sektor tersier mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar 122% atau rata-rata sekitar 6,1% per tahun.

Grafik perkembangan persentase PDRB sektor tertier di Kota Depok dapat dilihat pada **Gambar II.31.a** dan **Gambar II.31.b**.

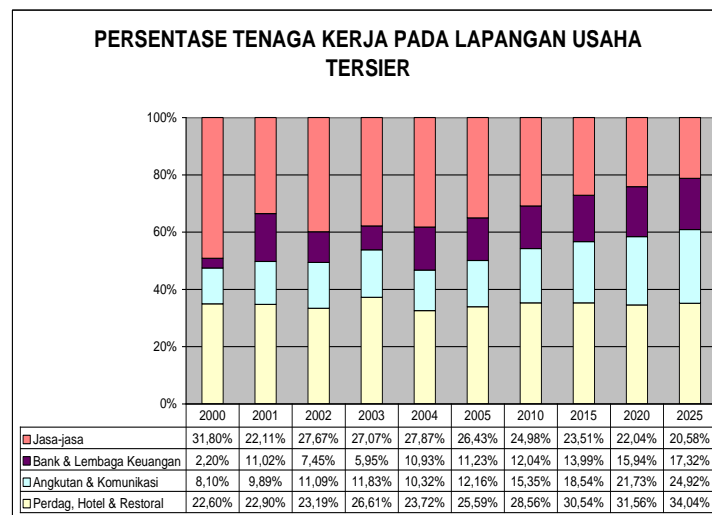


Gambar II.31.a. Perkembangan PDRB Sektor Tersier di Kota Depok



Gambar II.31.b. Perkembangan LPE Sektor Tersier di Kota Depok

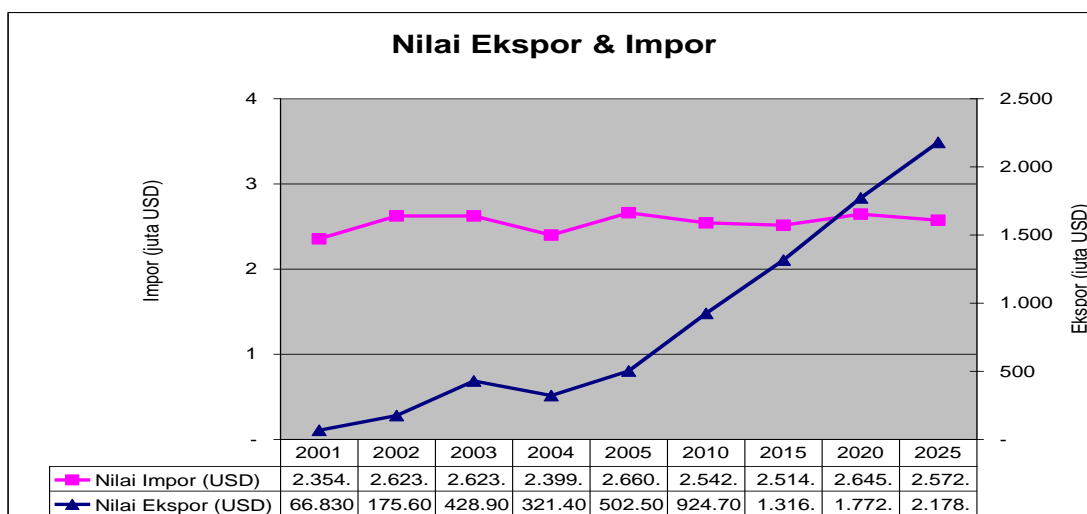
Seiring dengan peningkatan PDRB sektor tersier, persentase angkatan kerja Kota Depok yang bergerak di sektor tersier yang saat ini sudah sangat besar, akan semakin meningkat dimasa mendatang. Ini menunjukkan potensi sektor tersier dalam menyerap angkatan kerja di Kota Depok. Tenaga kerja sektor tersier yang saat ini mencapai 75,41% dari total angkatan kerja di Kota Depok, pada tahun 2010 diperkirakan akan naik 5,5% menjadi sekitar 81% dari total angkatan kerja dan akan naik lagi 5,64% menjadi sekitar 86,6% pada tahun 2015 dan terus naik lagi 4,7% menjadi sekitar 91,26% pada tahun 2020. Pada tahun 2025, penyerapan tenaga kerja pada sektor ini akan mencapai tingkat 96,86%. Grafik perkembangan persentase tenaga kerja sektor tertier di Kota Depok dapat dilihat pada **Gambar II.32**.



Gambar II.32. Perkembangan Persentase Tenaga Kerja Sektor Tersier di Kota Depok

- **Perdagangan, Hotel dan Restoran**

Perkembangan perdagangan Kota Depok dapat dilihat melalui nilai ekspornya sebagai salah satu indikator perdagangan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa selama dasa warsa 1990 sampai 1999 Kota Depok diklasifikasikan sebagai kota yang *tinggi ekspor industri manufakturnya*. Selanjutnya, selama lima tahun terakhir ini belum ada penelitian baru mengenai klasifikasi ekspor kabupaten/kota. Namun, faktanya nilai ekspor Kota Depok meningkat terus dari tahun ke tahun, yakni dari USD 66,83 juta pada tahun 2001 menjadi USD 321,48 juta pada tahun 2004. Jika trend ini berlanjut, diperkirakan pada tahun 2010 nilai ekspor Kota Depok akan mencapai USD 925 juta, kemudian akan meningkat menjadi USD 1,3 milyar pada tahun 2015, akan meningkat menjadi USD 1,77 milyar pada tahun 2020 dan pada tahun 2025 akan menjadi USD 2,18 milyar. Grafik nilai ekspor Kota Depok dapat dilihat pada **Gambar II.33**.

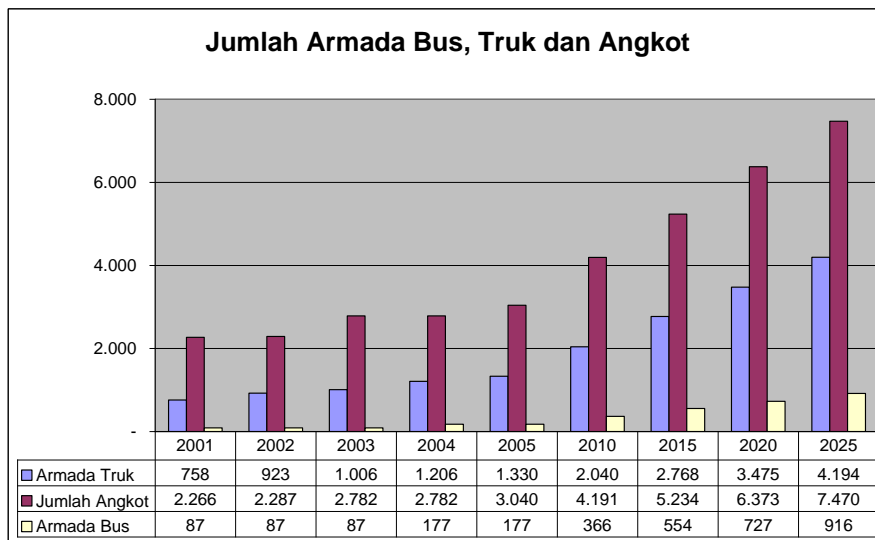


Gambar II.33. Perkembangan Ekspor dan Impor Kota Depok

Dibidang perhotelan selama tiga tahun terakhir di Kota Depok terjadi penurunan jumlah kamar hotel, tapi dari segi kualitas ada kecenderungan peningkatan, yaitu dari Melati 1 & 2 meningkat kualitasnya menjadi bintang 2. Letak Kota Depok yang terlalu dekat dengan ibukota Jakarta, yang merupakan pusat regional bagi pariwisata, hotel dan restoran, menyebabkan lapangan usaha ini tidak begitu maju di Kota Depok akibat sulit bersaing dengan kualitas dan kuantitasnya.

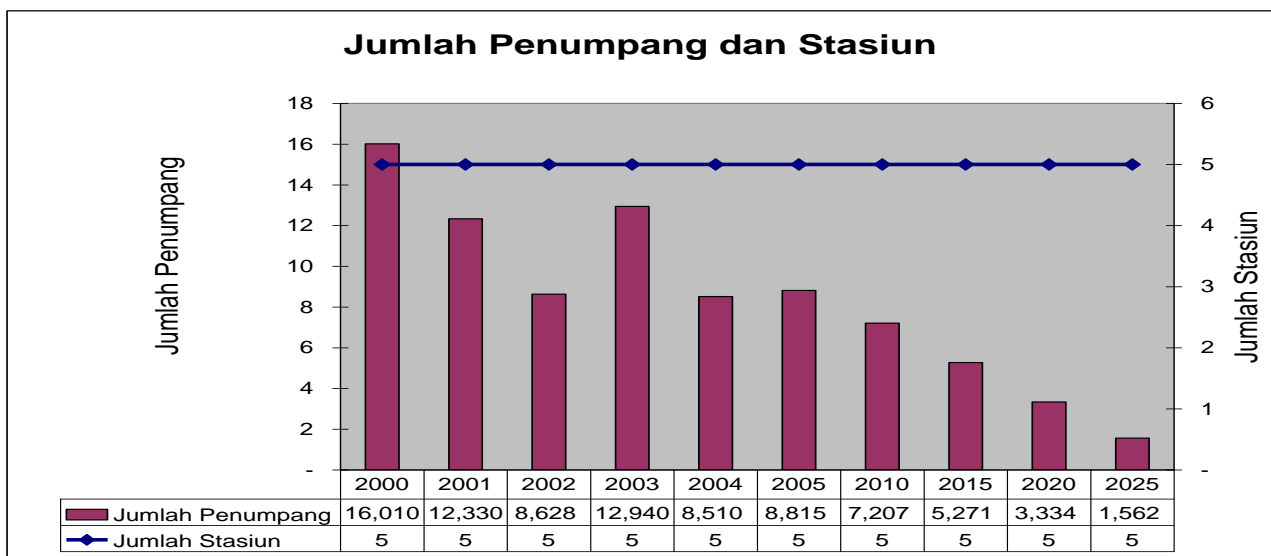
- Angkutan dan Komunikasi

Salah satu potensi Kota Depok adalah di sektor perhubungan. Banyaknya kegiatan *commuter* (pulang-pergi) Jakarta-Depok bagi sebagian besar warga Kota Depok menyebabkan angkutan bus, angkot dan kereta api berkembang cepat di Kota Depok. Perkembangan armada angkot, bus dan truk dapat dilihat pada **Gambar II.34**.



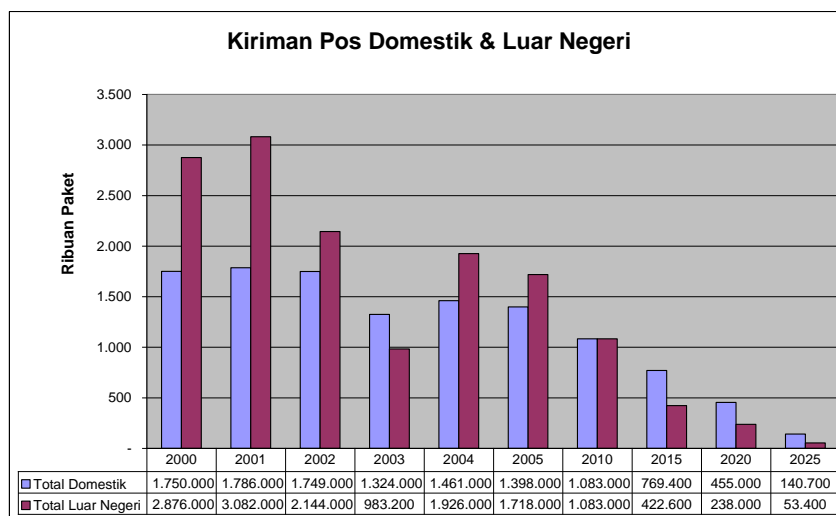
Gambar II.34. Perkembangan Armada Angkutan di Kota Depok

Meskipun kereta api merupakan angkutan umum yang paling murah dan efisien, namun selama lima tahun terakhir ini jumlah penumpangnya di Kota Depok terus menurun. Jika trend ini berlanjut, diperkirakan pada tahun 2025 jumlah penumpang kereta api hanya akan tinggal 17,72% dari jumlah penumpang pada tahun 2005. Kemungkinan penyebab penurunan ini adalah ketidaknyamanan angkutan tersebut dari segi : ketidakpastian jadwal keberangkatan, frekwensi keberangkatan yang terlalu jarang dan banyaknya kejahatan yang terjadi pada angkutan ini. Perkembangan jumlah penumpang kereta api dapat dilihat pada **Gambar II.35**.



Gambar II.35. Perkembangan Armada Angkutan di Kota Depok

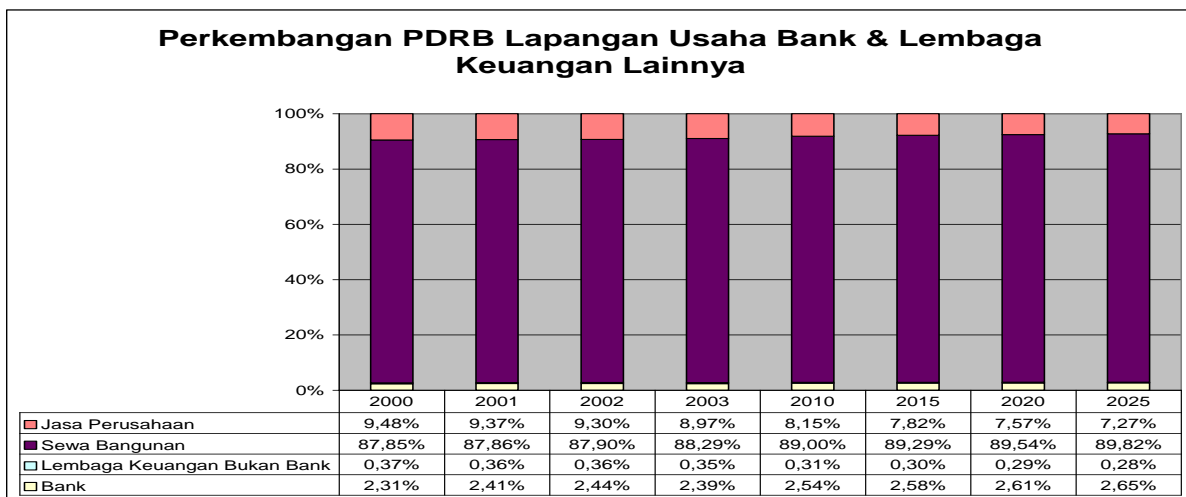
Perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat, termasuk teknologi internet dan telepon seluler, menyebabkan komunikasi melalui pos menjadi tidak efisien dan relatif mahal. Kecenderungan ini tampak juga pada perkembangan jumlah kiriman pos di Kota Depok. Total kiriman pos dari dan ke Depok, baik lokal maupun luar negeri diprediksikan akan terus menurun dimasa mendatang. Perkembangan jumlah penumpang kereta api dapat dilihat pada **Gambar II.36**.



Gambar II.36. Perkembangan Kiriman Pos di Kota Depok

- Bank dan Lembaga Keuangan

Selama lima tahun terakhir lapangan usaha bank dan lembaga keuangan lainnya didominasi oleh persewaan bangunan, dan diperkirakan dominasi ini akan berlanjut terus dimasa mendatang hingga mendekati 90% dari total lapangan usaha ini. Perkembangan lapangan usaha ini dapat dilihat melalui indikator PDRB sebagaimana dapat dilihat pada **Gambar II.37**.



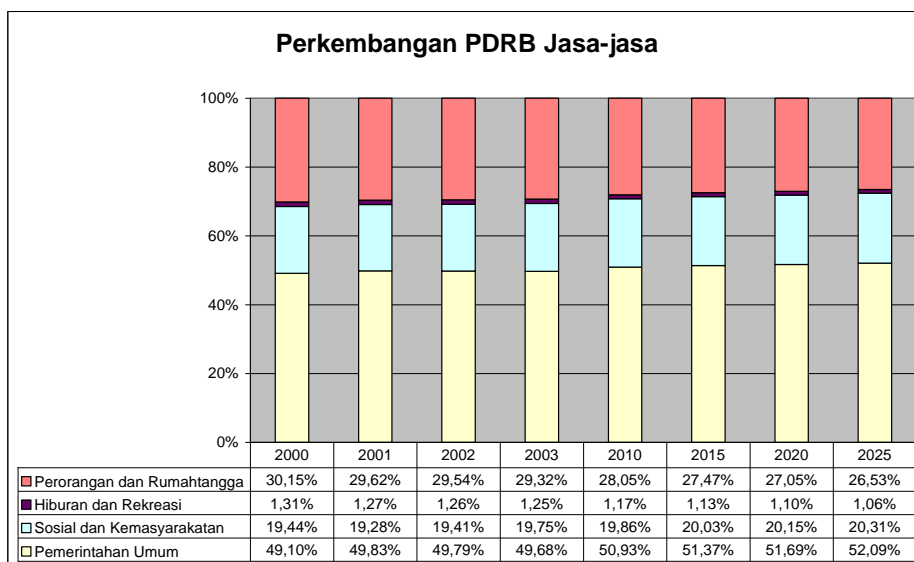
Gambar II.37. Perkembangan Lapangan Usaha Bank & Lembaga Keuangan lainnya

Jasa-Jasa

Jasa-jasa terdiri dari:

- **Jasa pemerintahan Umum**, yang diukur dari gaji pegawai Pemerintah Kota Depok.
- **Jasa Swasta**, terdiri dari jasa perorangan dan rumah tangga, jasa hiburan dan rekreasi, dan jasa sosial kemasyarakatan.

Diprediksikan dimasa depan jasa pemerintahan umum akan meningkat terus, sehingga akan melebihi jasa-jasa swasta. Grafik perkembangan lapangan usaha jasa-jasa dapat dilihat pada **Gambar II.38**.



Gambar II.38. Perkembangan Lapangan Usaha Jasa-jasa di Kota Depok

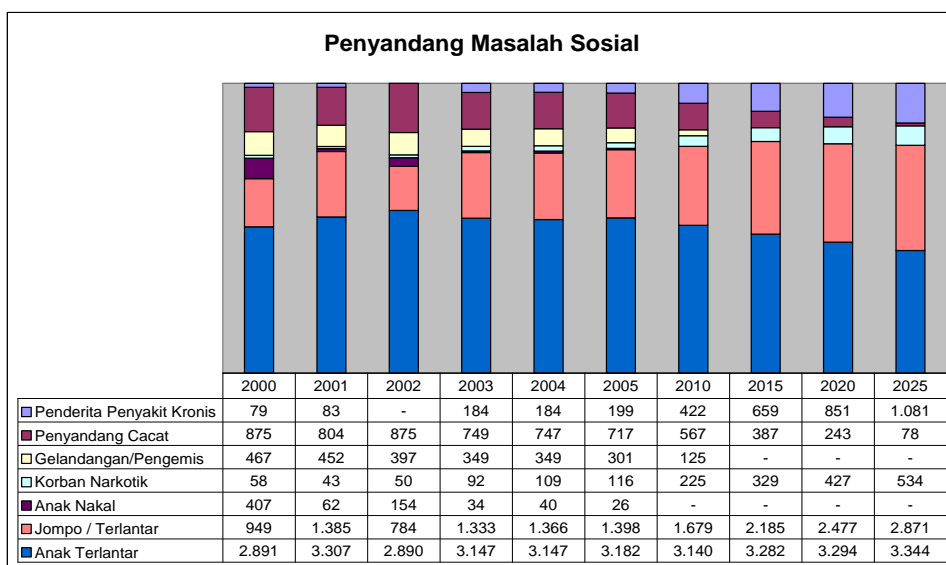
2.2.4. Kondisi Sosial Budaya & Politik

Selama 5 tahun terakhir, sebanyak 0,4% sampai 0,5% jumlah penduduk di Kota Depok menjadi penyandang masalah sosial. Secara persentase angka ini kecil dan cenderung turun dari tahun ke

tahun, dari 5,726 orang pada tahun 2000 menjadi 5,942 orang pada tahun 2006.

Diperkirakan persentase penduduk penyandang masalah sosial akan terus menurun di masa mendatang, yakni dari 0,4% pada saat ini menurun menjadi 0,35% pada tahun 2010, turun lagi menjadi 0,33% pada tahun 2015 dan turun menjadi 0,30% pada tahun 2020, selanjutnya menjadi 0,28% pada tahun 2025. Namun turunnya persentase tidak menurunkan jumlah nominal, karena seiring dengan pertumbuhan penduduk, jumlah penyandang masalah sosial meningkat yaitu dari 5.900 orang pada saat ini naik menjadi 6.100 orang pada tahun 2010, naik lagi menjadi 6.800 orang pada tahun 2015 dan naik menjadi 7.300 orang pada tahun 2020, serta menjadi 7.908 orang pada tahun 2025.

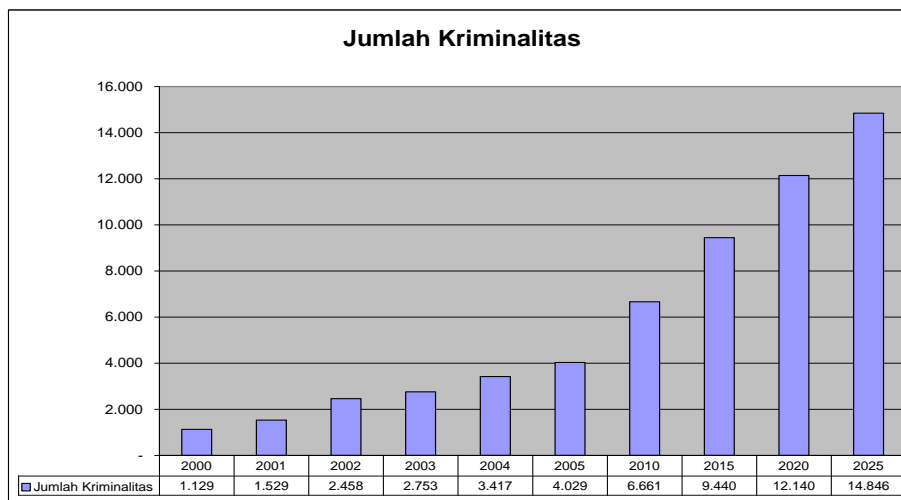
Diperkirakan jenis masalah sosial yang akan dihadapi di masa depan, diurutkan dari jumlah penyandang yang paling banyak, adalah: anak terlantar, orang jompo, penderita penyakit kronis, dan korban narkoba. Secara grafis, perkembangan jumlah penyandang masalah sosial dapat dilihat pada **Gambar II.39**.



Gambar II.39. Perkembangan Jumlah Penyandang Masalah Sosial di Kota Depok

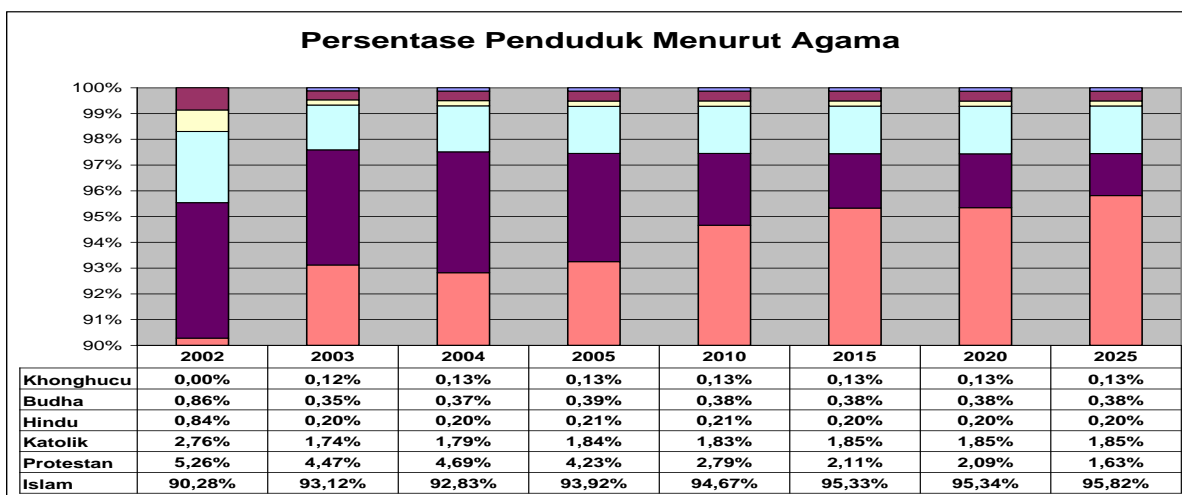
Pada tahun 2000, terjadi satu kasus kriminalitas per tahun untuk setiap 1000 orang penduduk Kota Depok. Pada tahun 2003 angka ini meningkat menjadi 2 kasus kriminal per tahun per 1000 penduduk. Diperkirakan angka kriminalitas ini akan melonjak menjadi 3,75 kasus per tahun per 1000 penduduk pada tahun 2010, dan meningkat menjadi 4,5 kasus pada tahun 2015, lalu meningkat lagi menjadi 5 kasus per tahun hingga tahun 2025.

Rata-rata kriminalitas harian di Kota Depok pada tahun 2000 adalah 3 kasus kriminal per hari. Pada tahun 2006 rata-rata kriminalitas meningkat menjadi sekitar 3 kasus kriminal per hari. Jika kecenderungan ini tidak berubah, maka periode tahun 2010-2025, tingkat kriminalitas akan meningkat menjadi 33 kasus per hari. Perkembangan jumlah kriminalitas per tahun di Kota Depok dapat dilihat pada **Gambar II.40**.



Gambar II.40. Perkembangan Kasus Kriminal di Kota Depok

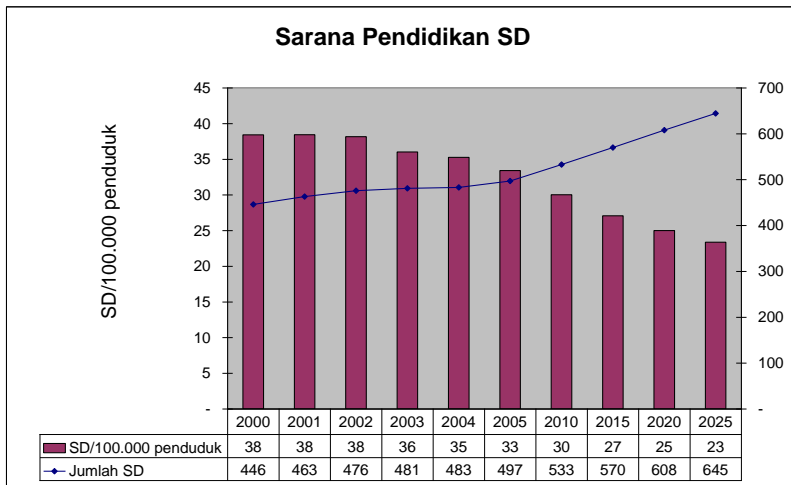
Selanjutnya perkembangan persentase pemeluk agama dan Kepercayaan di Kota Depok dapat dilihat pada **Gambar II.41**.



Gambar II.41. Persentase Penduduk Menurut Agama di Kota Depok

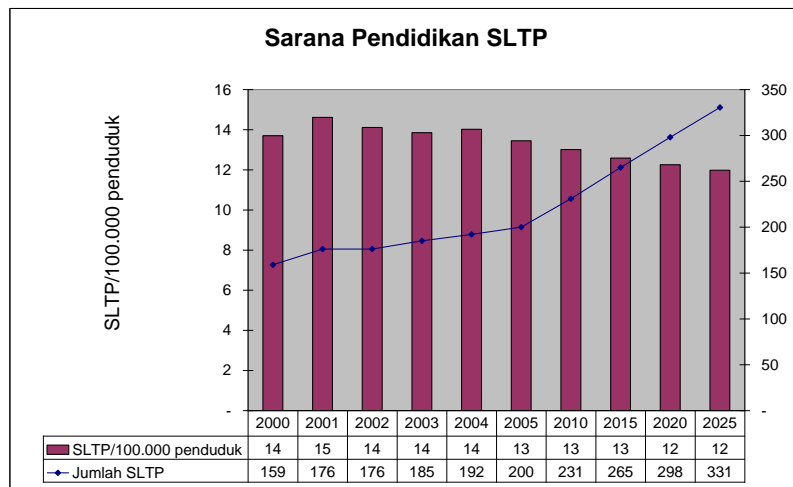
2.2.5. Kondisi Prasarana dan sarana

Pertumbuhan **sarana pendidikan** dasar di Kota Depok diperkirakan tidak akan dapat mengejar pertumbuhan penduduk. Meskipun jumlah bangunan SD terus bertambah, namun perbandingan jumlah SD per 100.000 penduduk terus menurun sejak tahun 2000. Pada tahun 2000 di Kota Depok ada 446 SD dan jumlah penduduk 1.160.791 orang; ini berarti untuk setiap 100.000 penduduk ada 38 SD. Pada tahun 2006 jumlah SD meningkat menjadi 483 buah, sementara itu jumlah penduduk juga meningkat menjadi 1.369.457, sehingga jumlah SD untuk setiap 100.000 penduduk menurun menjadi 35 SD. Jika kecenderungan ini berlanjut maka dimasa depan kapasitas SD dibandingkan jumlah penduduk akan lebih buruk dari saat ini. Jumlah sarana sekolah dasar dan perbandingannya dengan penduduk di Kota Depok dapat dilihat pada **Gambar II.42**.



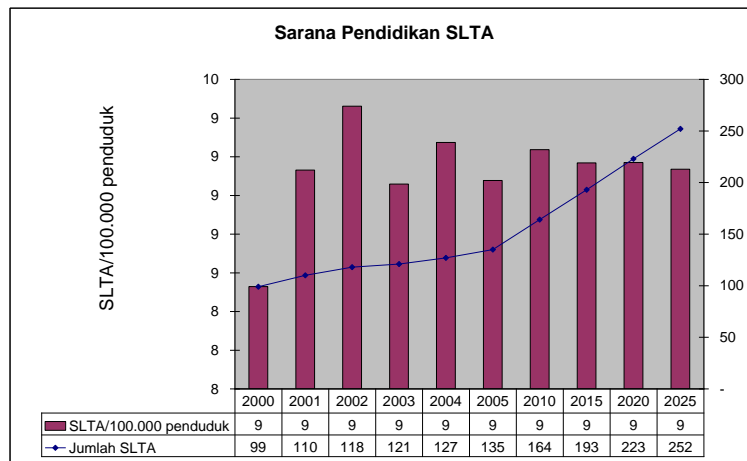
Gambar II.42. Perkembangan Sarana SD di Kota Depok

Sarana pendidikan SLTP di Kota Depok diperkirakan juga tidak akan dapat mengejar pertumbuhan penduduk. Meskipun jumlah bangunan SD terus bertambah, namun perbandingan antara jumlah SLTP dengan jumlah penduduk terus menurun sejak tahun 2000. Jika kecenderungan ini berlanjut maka dimasa depan kapasitas SD dibandingkan jumlah penduduk akan lebih buruk dari saat ini. Jumlah sarana SLTP dan perbandingannya dengan penduduk di Kota Depok dapat dilihat pada **Gambar II.43.**



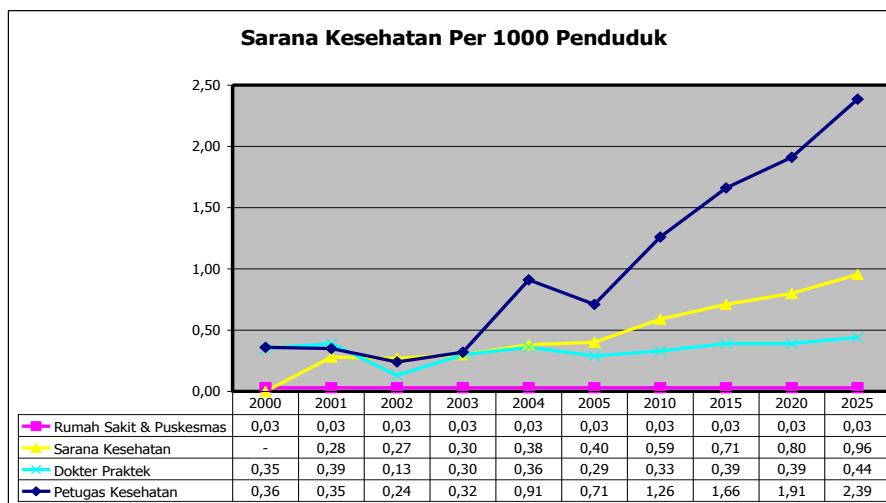
Gambar II.43. Perkembangan Sarana SLTP di Kota Depok

Sarana pendidikan SLTA agak berbeda dengan sarana sekolah dasar, diperkirakan pertumbuhan jumlah SLTA akan sebanding dengan pertumbuhan penduduk. Sehingga dari tahun 2000 yang lalu sampai tahun 2020 kelak perbandingan jumlah SLTA dengan jumlah penduduk di Kota Depok selalu tetap sebesar 9 SLTA untuk setiap 100.000 penduduk. Ini berarti kelak di masa depan persentase penduduk Kota Depok yang pernah mengenyam bangku SLTA akan semakin sedikit. Jumlah sarana SLTA dan perbandingannya dengan penduduk di Kota Depok dapat dilihat pada **Gambar II.44.**



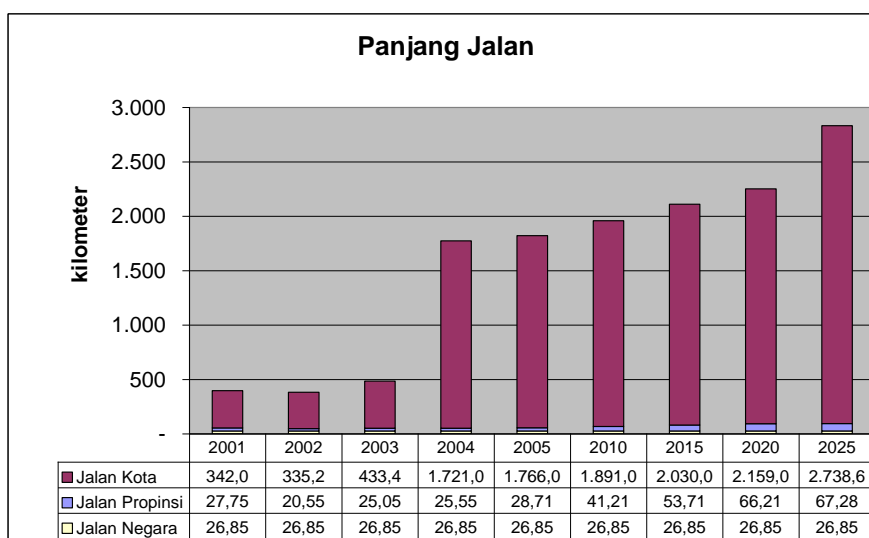
Gambar II.44. Perkembangan Sarana SLTA di Kota Depok

Dibidang sarana kesehatan, jumlah rumah sakit dan puskesmas saat ini di Kota Depok rata-rata adalah 3 buah per 100 ribu penduduk. Total sarana kesehatan termasuk pengobatan alternatif adalah 42 per 100 ribu penduduk. Diperkirakan di masa depan jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas tidak berubah, yakni rata-ratanya tetap 3 buah per 100 ribu penduduk. Diperkirakan total sarana kesehatan termasuk pengobatan alternatif menjadi dua kali lipat lebih, yakni 86 per 100 ribu penduduk. Jumlah sarana kesehatan non rumah sakit diperkirakan akan meningkat pesat karena jumlah rumah sakit tidak bertambah. Perbandingan jumlah sarana kesehatan dengan jumlah penduduk di Kota Depok dapat dilihat pada **Gambar II.45**.



Gambar II.45. Perkembangan Sarana Kesehatan di Kota Depok

Panjang **sarana jalan** di Kota Depok sejak tahun 2001 terus meningkat. Diperkirakan sampai tahun 2025, panjang jalan Kota Depok rata-rata bertambah 10 km per tahun, baik jalan negara, jalan propinsi maupun jalan kota. Perkembangan panjang jalan di Kota Depok dapat dilihat pada **Gambar II.46**.



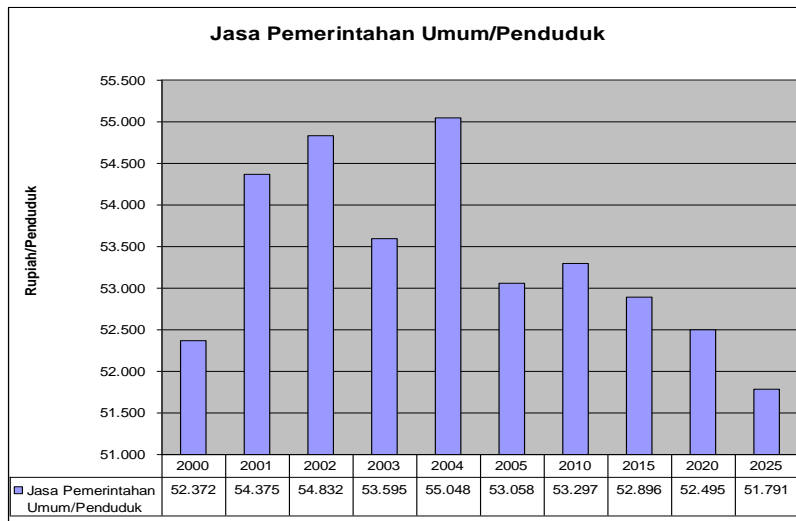
Gambar II.46. Perkembangan Sarana Jalan di Kota Depok

2.2.6. Kondisi Pemerintahan

Dari data PDRB diketahui bahwa nilai jasa pemerintahan umum dari tahun ke tahun meningkat terus. Pada tahun 2000 nilai jasa pemerintahan umum adalah Rp. 60.793 juta dengan jumlah penduduk 1.160.791 orang, maka jasa pemerintahan umum per penduduk Depok adalah Rp. 52.372,-. Pada tahun 2005, jasa pemerintahan umum per penduduk meningkat menjadi Rp. 130.460,-, artinya jika pelayanan yang diberikan pemerintahan umum masih sama kualitas dan kuantitasnya dengan tahun 2000, maka pelayanan yang diberikan lebih mahal harganya. Artinya telah terjadi penurunan efisiensi pemerintahan umum dari tahun 2000 ke tahun 2005. Diperkirakan dimasa mendatang pemerintahan umum akan makin efisien diukur dari besarnya nilai jasa pemerintahan umum dibandingkan jumlah penduduk. **Tabel II.9.** dan **Gambar II.47.** menunjukkan kecenderungan jasa pemerintahan umum dimasa mendatang.

Keterangan	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2010	2015	2020	2025
Jasa Pemerintahan Umum (juta Rp.)	60.793,2	65.504,7	68.388,2	71.588,8	75.386,3	78.913,3	94.633,3	111.535,5	127.658,7	142.866,2
Jumlah Penduduk	1.160.791	1.204.687	1.247.233	1.335.734	1.369.457	1.487.295	1.775.580	2.105.157	2.431.841	2.758.525
Jasa Pemerintahan Umum/Penduduk	52.372	54.375	54.832	53.595	55.048	53.058	53.297	52.896	52.495	51.791

Tabel II.9 Jasa Pemerintahan Umum di Kota Depok



Gambar II.47. Perkembangan Jasa Pemerintahan Umum per Penduduk di Kota Depok

2.3. Modal Dasar

Modal dasar pembangunan daerah merupakan salah satu kekuatan dan peluang, baik yang efektif maupun potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan daerah, antara lain :

1. Kota Depok secara geografis mempunyai kedudukan yang cukup strategis sebagai pendukung ibu kota negara dan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional, memiliki tingkat mobilitas penduduk yang tinggi.
2. Jumlah penduduk yang cukup banyak sebagai pendukung pembangunan daerah.
3. Mempunyai keanekaragaman sosial dan budaya yang merupakan daya tarik daerah.
4. Memiliki potensi sumberdaya lokal berupa pertanian perkotaan, industri kecil dan menengah serta perdagangan dan jasa yang dapat menggerakkan ekonomi lokal.
5. Perkembangan politik yang telah melalui tahap awal reformasi telah memberikan perubahan yang mendasar bagi demokratisasi di bidang politik dan ekonomi serta desentralisasi di bidang pemerintahan dan pengelolaan pembangunan.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2006-2025

3.1. Visi Pembangunan Daerah

Analisis kondisi umum daerah saat ini dan prediksi kondisi umum ke depan mengemukakan hal-hal berikut:

1. Kondisi geomorfologi dan lingkungan hidup Kota Depok saat ini sudah mengalami tekanan yang sangat berat akibat pertumbuhan penduduk dan persaingan untuk mendapatkan sumberdaya lahan, sumber daya air dan sumber daya lainnya. Diprediksikan dimasa depan tekanan terhadap lingkungan hidup akan semakin berat, sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk Kota Depok.
2. Kondisi demografi Kota Depok saat ini dihadapkan dengan permasalahan kepadatan penduduk, jumlah angkatan kerja, jumlah pencari kerja dan sebagainya. Prediksi kondisi demografi dimasa mendatang mengindikasikan adanya peningkatan intensitas terhadap permasalahan-permasalahan demografis tersebut.
3. Kondisi ekonomi dan sumber daya alam Kota Depok saat ini sudah mengarah pada struktur ekonomi tertentu, yaitu struktur ekonomi modern yang bertumpu pada sektor tersier dan didukung sektor Sekunder. Dimasa depan diprediksikan bahwa tumpuan utama ekonomi Kota Depok akan bertumpu ke sektor tersier.
4. Kondisi sosial budaya Kota Depok saat ini sudah mengarah pada budaya metropolis yang multi etnis dan dengan latarbelakang beragam tingkat intelektualitas. Dimasa depan, kondisi sosial budaya yang ada akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman.
5. Kondisi sarana dan prasarana Kota Depok saat ini cukup baik dalam segi kualitas, walaupun masih kurang dalam segi rasio kuantitas per penduduk, terutama rasio rumah sakit umum per penduduk. Di masa depan diprediksikan rasio jumlah sarana dan prasarana per penduduk di Kota Depok akan semakin kecil akibat tidak sebandingnya pertumbuhan jumlah penduduk dengan pertumbuhan jumlah sarana dan prasarana.
6. Kondisi pemerintahan Kota Depok saat ini semakin dituntut untuk meningkatkan kinerja pelayanan yang berkualitas. Diprediksikan dimasa depan tuntutan terhadap kinerja pemerintahan akan semakin tinggi dengan kinerja pelayanan yang diharapkan adalah pelayanan prima.

Berdasarkan kondisi diatas, tantangan dan prediksi yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan modal dasar berupa Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Sosial, Budaya dan Ekonomi yang dimiliki, maka **Visi** Pembangunan Kota Depok tahun 2006-2025 adalah :

“ DEPOK KOTA NIAGA DAN JASA, YANG RELIGIUS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN “

Visi pembangunan Kota Depok tahun 2006-2025 ini merupakan komitmen politis yang mengarah pada pencapaian tujuan nasional seperti tertuang dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tujuan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang menetapkan Kota Depok sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan salah satu kawasan andalan/kegiatan utama berupa Jasa dan Sumber Daya Manusia. Sebagai gambaran kualitatif, Visi Kota Depok mengandung makna sebagai berikut :

a. Kota Niaga dan Jasa

Terwujudnya Kota Depok sebagai kota yang menjamin akses dan mobilitas kegiatan niaga dan jasa yang kompetitif, yang didukung oleh basis pendidikan dan potensi lokal.

b. Kota Religius

Terwujudnya masyarakat Depok yang menjalankan kewajiban agama bagi masing-masing pemeluknya, yang tercermin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam akhlak, moral dan etika.

c. Kota Berwawasan Lingkungan

Terwujudnya Depok sebagai kota yang memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dengan mengindahkan kelestarian dan kelangsungannya untuk generasi yang akan datang, yang tercermin dalam pemanfaatan ruang yang serasi antara untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi, perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, peningkatan kenyamanan kota, serta terpelihara dan termanfaatkannya keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

Dari penjelasan diatas, Visi Kota Depok mengarahkan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah Kota Depok untuk fokus kepada bidang-bidang ekonomi yang menjadi tumpuan utama Kota Depok saat ini dan dimasa mendatang, dengan memperhatikan kenyamanan lingkungan, kenyamanan mencari penghidupan, kenyamanan dalam memperoleh pendidikan, kenyamanan melaksanakan kegiatan keagamaan, kenyamanan menggunakan sarana dan prasarana umum, serta kenyamanan dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah daerah.

3.2 Misi Pembangunan Daerah.

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah diatas, maka ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Mengelola perekonomian daerah secara fokus, efisien dan efektif, dengan mengutamakan perhatian kepada sektor-sektor yang memberikan nilai tambah dan pertumbuhan tertinggi.
2. Memanfaatkan dan mengelola secara optimal seluruh potensi letak geografis sesuai dengan daya dukung lingkungan.
3. Membangun sumberdaya manusia yang berdaya saing di lingkungan nasional dan internasional melalui peningkatan kualitas pendidikan, yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan, hukum dan sosial budaya.
4. Menyediakan sarana dan prasarana kota dalam jumlah dan kualitas yang memadai dan diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang.
5. Menata sistem pemerintahan yang profesional, baik, bersih, transparan, demokratis, dan bertanggung jawab.

BAB IV
ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG TAHUN 2006-2025

Dalam ilmu perkembangan wilayah dikenal lima tahapan perkembangan yaitu : 1) tahap spesialisasi ekspor, 2) tahap ekspor kompleks, 3) tahap kematangan ekonomi, 4) tahap pembentukan metropolis, 5) tahap kemajuan teknis dan profesional. Ciri-ciri masing-masing tahapan perkembangan wilayah tersebut dapat dilihat pada **Tabel IV-1.** dibawah ini.

Tabel IV-1. Tahap-tahap perkembangan wilayah

Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
Spesialisasi Ekspor	Ekspor kompleks	Kematangan Ekonomi	Pembentukan metropolis	Kemajuan teknis & profesional
Ciri: <ul style="list-style-type: none"> • adanya industri sektor primer yang dominan •Pertumbuhan wilayah sangat bergantung pada hasil industri sektor primer tsb 	Ciri: <ul style="list-style-type: none"> •Selain industri dominan juga mengekspor hasil industri kaitannya (ke depan maupun ke belakang) 	Ciri: <ul style="list-style-type: none"> •Aktivitas ekonomi telah terdiversifikasi •Muncul industri substitusi impor •Wilayah lebih mandiri 	Ciri: <ul style="list-style-type: none"> •Wilayah telah menjadi pusat kegiatan ekonomi untuk melayani kebutuhan barang & jasa wilayah pinggiran •Volume aktivitas ekspor sangat besar dan kenaikan impor yang signifikan. •Menguatnya keterkaitan ekonomi antar wilayah, adanya proses aglomerasi, dan terbentuknya wilayah metropolitan. 	Ciri: <ul style="list-style-type: none"> •Wilayah berperan nyata pada perekonomian nasional •Berkembang produk dan proses-proses relatif canggih, baru, efisien dan terspesialisasi •Aktivitas ekonomi bertumpu pada inovasi, modifikasi & imitasi yang lebih mengarah pada kepuasan individual dari pada masyarakat •Sistem ekonomi menjadi kompleks, saling berkait satu sama lain.
Dominant Export Sector (DXS): Sektor primer dalam jumlah terbatas (relatif terhadap produksi wilayah)	Dominant Export Sector (DXS): Sektor primer dengan variasi dan jumlah lebih banyak didukung industri jasa transportasi	Dominant Export Sector (DXS): Sektor sekunder, yaitu manufaktur yang memproses produk-produk sektor primer	Dominant Export Sector (DXS): Sektor sekunder, yaitu manufaktur fabrikatif dengan teknologi massal, yang memanfaatkan produk-produk hasil manufaktur hulunya	Dominant Export Sector (DXS): Sektor tersier seperti: perbankan, jasa profesional dll.

Dari data teknis pada Bab II dapat disimpulkan bahwa Kota Depok saat ini berada pada pertengahan tahap perkembangan **kematangan ekonomi** menuju tahap awal **pembentukan metropolis**. Dalam Bab II bisa dilihat bahwa aktivitas ekonomi Kota Depok telah terdiversifikasi dari lapangan usaha pertanian, industri sampai perdagangan dan jasa. Dari segi ekonomi, wilayah Kota Depok juga mulai lebih mandiri. Dari karakteristik ini, Kota Depok bisa dikatakan sudah masuk tahap kematangan ekonomi (tahap 3). Disamping itu, dalam Bab II disebutkan juga bahwa Kota Depok merupakan kota yang tinggi ekspor manufakturnya. Volume aktivitas ekspor Kota Depok yang saat ini sudah tinggi diproyeksikan akan semakin tinggi dimasa mendatang. Kemudian secara nyata ada keterkaitan ekonomi yang kuat antara wilayah Kota Depok, Kota Jakarta dan Bogor. Ciri-ciri ini merupakan karakteristik wilayah metropolis. Sehingga dapat dikatakan bahwa saat ini Kota Depok sedang, atau bahkan sebagian sudah menjadi wilayah metropolis.

Secara alamiah Kota Depok dalam 20 tahun ke depan akan menjadi kota metropolitan atau menjadi bagian metropolitan yang lebih besar. Perkembangan wilayah secara alamiah ini tidak dapat di cegah, karena itu Arah Pembangunan Daerah Kota Depok harus disesuaikan dalam rangka mempersiapkan diri terjadinya pembentukan metropolitan Depok; dengan tetap berpegang pada misi yang disepakati oleh seluruh pemangku-kepentingan pembangunan Kota Depok.

IV.1. Arah Umum Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2025

IV.1.1 Mengelola perekonomian daerah secara fokus, efisien dan efektif dengan mengutamakan perhatian kepada sektor-sektor yang memberikan nilai tambah dan pertumbuhan yang tinggi.

1. Pembangunan perekonomian diarahkan dalam rangka penguatan perekonomian lokal serta berorientasi dan berdaya saing regional dan global. Dalam kaitan ini, sektor sekunder dan tersier merupakan unggulan atau motor penggerak yang perlu mendapat fokus perhatian, yang didukung oleh sektor primer unggulan.
2. Perekonomian dikembangkan dalam rangka perluasan kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan
3. Peningkatan daya saing usaha kecil dan menengah (UKM) sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi daerah.
4. Peningkatan investasi daerah dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik, dan meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai.
5. Peningkatan peran pemerintah daerah sebagai fasilitator, regulator dan katalisator pembangunan ekonomi yang efisien dan efektif terutama dalam pelayanan publik, penciptaan lingkungan usaha yang kondusif dan terjaganya keberlangsungan mekanisme pasar.

IV.1.2 Memanfaatkan dan mengelola secara optimal potensi letak geografis sesuai dengan daya dukung lingkungan.

1. Memanfaatkan letak geografis yang berdekatan dengan ibukota negara sebagai pasar produk ekonomi yang terbuka luas, serta peluang berusaha/ekonomi sebagai limpahan kegiatan ekonomi ibukota.
2. Menangkap peluang sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yaitu sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional, sabagai pusat jasa, pusat pengolahan, simpul transportasi dengan sekala pelayanan nasional atau beberapa propinsi.
3. Pemanfaatan sumberdaya alam dan kegiatan ekonomi diarahkan untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya secara rasional, optimal dan bertanggungjawab, yaitu dengan menjaga dan melestarikan sumberdaya alam, khususnya sumberdaya air dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

IV.1.3 Membangun sumberdaya manusia yang berdaya saing di lingkungan nasional dan internasional melalui peningkatan kualitas pendidikan, yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan, hukum dan sosial budaya.

1. Pembangunan sumberdaya manusia yang berdaya saing diarahkan untuk menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan agama yang bermutu, pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, pemberdayaan perempuan dan anak serta pemuda.
2. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang berharkat, berakhlak mulia, disesuaikan dengan pembangunan sosial ekonomi masa depan dan perkembangan iptek sehingga bisa bersaing dalam era global.
3. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang guna mendapatkan kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai prasyarat dalam mewujudkan produktivitas dan kemampuan daya saing. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif.
4. Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan spiritual.
5. Pengembangan budaya diarahkan untuk mewujudkan budaya kreatif, inovatif dan produktif yang berorientasi iptek sehingga mampu bersaing secara regional maupun global. Selain itu juga penting diiringi dengan pembangunan kesenian, kebudayaan dan pembentukan karakter bangsa dan sistem sosial yang berakar, unik, modern dan unggul, sehingga tercipta keseimbangan material dan emosional.
6. Pembangunan hukum terutama diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang berkesadaran dan berbudaya hukum tinggi, menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis, serta penyusunan produk hukum yang dinamis dengan memperhatikan pengaruh globalisasi.

IV.1.4 Menyediakan sarana dan prasarana kota dalam jumlah dan kualitas yang memadai dan diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah.

1. Pembangunan sarana dan prasarana diarahkan untuk pembangunan sektor transportasi, pendidikan, kesehatan, perdagangan, sumber daya air, permukiman, energi dan kelistrikan serta sarana/prasarana pemerintahan.
2. Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan, dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar wilayah, dan pembentukan struktur ruang. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan efisiensi dan aksesibilitas pergerakan lalu lintas jalan

(melalui peningkatan manajemen transportasi, pembangunan jalan dan terminal dan lain-lain), integrasi berbagai moda angkutan, peningkatan pelayanan angkutan umum, peningkatan ketertiban dan keselamatan lalu lintas, rencana pembangunan jalan dan terminal layanan lokal dan nasional.

3. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan diarahkan untuk memenuhi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, dengan mengarahkan terwujudnya kawasan pendidikan terpadu dan layanan kesehatan tingkat nasional.
4. Pembangunan sarana dan prasarana perdagangan diarahkan untuk mewujudkan pelayanan perdagangan yang berkualitas yang memiliki jangkauan pelayanan sub kota dan wilayah kota.
5. Pembangunan sarana dan prasarana sumberdaya air ditunjukkan untuk mewujudkan fungsi air sebagai sumberdaya sosial dan ekonomi sehingga dapat menjamin kebutuhan pokok hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pengembangan sistem drainase yang baik, antara lain melalui partisipasi masyarakat dan kemitraan diantara pemangku kepentingan.
6. Pembangunan sarana dan prasarana pemukiman diarahkan untuk penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
7. Pengembangan sarana dan prasarana energi dan kelistrikan diarahkan untuk pengembangan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerataan pelayanan penerangan jalan umum, dan kegiatan ekonomi.
8. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan diarahkan untuk mendukung terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.

IV.1.5 Menata sistem pemerintahan yang profesional, baik, bersih, transparan, demokratis dan bertanggungjawab.

1. Penataan sistem pemerintahan daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, meningkatkan pelayanan dalam rangka keberdayaan masyarakat dalam pembangunan, dan mengurangi serta mencegah penyalahgunaan kewenangan.
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan diarahkan untuk mengefektifkan fungsi-fungsi kelembagaan pemerintah, meningkatkan efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pelayanan, menata dan meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur agar lebih profesional dan berorientasi kepada pelayanan.
3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat diarahkan untuk meningkatkan pelayanan dasar/umum dan pelayanan unggulan, serta peningkatan transparansi, peningkatan akses dan sebaran informasi.

IV.2. Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kota Depok

A. RPJM ke-1 (2006 s/d 2011)

- Diupayakan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk semua kebutuhan dasar masyarakat
- Pembangunan dan penyempurnaan Peraturan Publik (*public regulation*)
- Pembangunan Kapasitas SDM
- Pembangunan Infrastruktur Sektor Unggulan

Target Pembangunan Daerah

- Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum
- Terpenuhinya SPM
- Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
- Peningkatan ekonomi masyarakat
- Adanya fokus pada produk dan jasa unggulan

B. RPJM ke-2 (2012 s/d 2016)

- Peningkatan Pelayanan diatas SPM
- Pengembangan Kompetensi SDM
- Pengembangan Produk dan jasa Unggulan
- Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Sektor Unggulan

Target Pembangunan Daerah

- Meningkatkan pelayanan diatas SPM
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas infra struktur pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah
- Berkembangnya produk dan jasa unggulan Daerah.

C. RPJM ke-3 (2017-2021)

- Peningkatan Lanjut Kualitas Pelayanan Dasar
- Pengembangan lanjut kompetensi SDM
- Pengembangan daya saing regional Sektor Unggulan
- Pemeliharaan dan Pengembangan lanjut Infrastruktur menuju pembentukan metropolis

Target Pembangunan Daerah

- Menuju Kualitas Pelayanan Prima
- Berkembangnyadaya saing regional produk dan jasa unggulan
- Kesiapan SDM dan infrastruktur menjalani era metropolis

D. RPJM ke-4 (2022-2025)

- Pemeliharaan Kualitas Pelayanan Dasar
- Pengembangan lanjut kompetensi SDM
- Pengembangan daya saing regional dan internasional Sektor Unggulan
- Pemeliharaan dan pengembangan lanjut Infrastruktur menuju awal kemajuan teknis dan profesional

Target Pembangunan Daerah

- Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dasar
- Kesiapan SDM dan infrastruktur memasuki era kemajuan teknis dan profesional

IV.3 Peran Sub-wilayah Pembangunan Kota Depok Mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam konsepsi Pengembangan wilayah dan penataan struktur tata ruang kota ditetapkan kebijakan pengembangan:

1. Pengembangan pusat bagian wilayah kota dan beberapa sub-bagian wilayah kota yang diarahkan dapat berkembang sesuai dengan fungsinya masing-masing.
2. Menata kawasan pusat-pusat kegiatan ekonomi, perdagangan dan jasa, lokasi industri, serta kawasan pemukiman dalam rangka mengoptimalkan manfaat sumberdaya lahan yang terbatas demi nilai tambah yang lebih tinggi.
3. Pembangunan sarana dan prasarana keseluruhan bagian kota secara integral sekaligus pembukaan layanan transportasi umum ke seluruh jurusan secara berimbang dalam rangka melayani kebutuhan transportasi yang dapat dijangkau daya beli masyarakat umum.
4. Mempertahankan fungsi kawasan lindung, terutama di sekitar danau dan situ, sungai dan sempadan sungai serta mata air dan ruang terbuka hijau, serta menata kawasan budidaya perkotaan sehingga tidak mengalami transformasi dan perubahan fungsi secara berlebihan dalam rangka konservasi ekosistem.

Pengembangan struktur ruang kota selain berdasarkan adanya potensi kecenderungan (trend oriented), mengarah pula pada faktor pembentukan struktur ruang optimal (target oriented). Konsep struktur tata ruang Kota Depok dimasa datang dikembangkan melalui pengolahan potensi jenis kegiatan yang akan berkembang, pengembangan infrastruktur dan luasan wilayah sesuai dengan fungsi kota yang dikehendaki.

Berdasarkan pertimbangan pola sebaran kegiatan dan fungsi, secara makro konsep wilayah pengembangan Kota Depok memiliki ciri sebagai berikut:

1. Wilayah Utara-Timur

Fungsi jasa perdagangan dan jasa, industri, perkantoran, pendidikan, pemukiman kepadatan sedang sampai tinggi

2. Wilayah Selatan-Barat

Fungsi pertanian/agroindustri, pusat perdagangan dan jasa, budaya, pendidikan, wisata, perkantoran, industri yang ramah lingkungan, perdagangan dan jasa, serta permukiman kepadatan sangat rendah sampai sedang.

Kegiatan perdagangan dan jasa diarahkan untuk mengisi pusat dan sub-pusat kota. Pusat-pusat perdagangan dan komersial diarahkan dilokasi sebagai berikut:

1. Pusat perdagangan utama kota, dengan jenis kegiatan termasuk kegiatan informal dengan skala pelayanan lokal dan wilayah
2. Sub-pusat perdagangan dan jasa dikembangkan sesuai dengan arahan untuk melayani bagian wilayah kota dengan tujuan untuk lebih pemeratakan jangkauan fasilitas kota.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan “*Visi, Misi, Program dan Arah Umum Pembangunan Jangka Panjang Kota Depok Tahun 2006 – 2025*” ini merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam membangun wilayah dan masyarakat Kota Depok untuk periode dua puluh tahun ke depan. Penjabaran lebih lanjut dari dokumen ini dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPM) Lima Tahunan, Rencana Operasional Setahun berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Penganggaran Setahun berupa Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Penyusunan “*Visi, Misi, Program dan Arah Umum Pembangunan Jangka Panjang Kota Depok Tahun 2006 – 2025*” ini disesuaikan dengan potensi dan kemampuan sumberdaya yang dimiliki, aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kota Depok, serta mempertimbangkan pengaruh lingkungan eksternal saat ini. Apabila dalam penerapan beberapa program dan kegiatan utama dari dokumen ini tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perubahan lingkungan eksternal di masa mendatang, maka akan dilakukan penyesuaian (*adjustment*) seperlunya untuk diselaraskan dengan tuntutan perubahan kebutuhan masyarakat dan lingkungan eksternal tersebut.

Akhirnya, keberhasilan dalam penerapan dokumen ini dan rencana penjabarannya sangat tergantung kepada komitmen, integritas dan dedikasi para pemimpin Kota Depok, beserta dukungan partisipasi dari masyarakat dan perusahaan swasta yang peduli dengan pengembangan Kota Depok.

WALIKOTA DEPOK,

ttd.

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL